



# w a r t a bea cukai

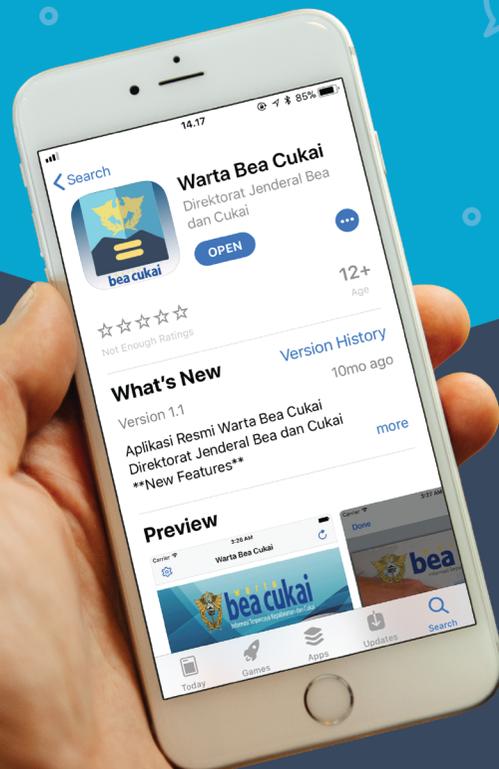
Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai

## PELUNCURAN PROGRAM PERIZINAN **ONLINE**



# Warta Bea Cukai

## Download the app now



Direktorat Jenderal  
Bea dan Cukai

## DARI REDAKSI

Naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat merupakan tujuan yang ingin dicapai Indonesia dalam persaingan perdagangan. Upaya untuk menghadapi persaingan dan kompetisi global, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 jurus kebijakan. Bagaimana peran bea cukai sebagai pelaksana kebijakan, simak laporan utama edisi kali ini.

Gorontalo yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Serambi Madinah ternyata banyak menyimpan potensi dan peluang yang bisa berdampak langsung pada penerimaan. Dede Hendrajaya, sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Gorontalo akan menjelaskan bagaimana Bea Cukai Gorontalo mengembangkan potensi-potensi yang ada di rubrik profil kantor.

Rubrik travel notes kita akan diajak untuk menikmati keindahan dari panorama Punthuk Mongkrong. Sebuah kawasan wisata di Kota Magelang, Jawa Tengah. Pengunjung dapat dengan puas menikmati keindahan matahari terbit di balik dua gunung yaitu gunung Merapi dan gunung Merbabu. Dan saat matahari terbenam di balik perbukitan Menoreh.

Teddy Triatmodjo dan Ketertarikannya dengan dunia komunikasi dan kehumasan menjadi cerita salah satu pegawai bea cukai berprestasi edisi ini. Dan untuk galeri foto diisi oleh karya-karya dari Harry Lang yang saat ini berdinis sebagai pegawai Bea Cukai Sintete.

Last but not least, jangan lupa kirimkan kontribusi anda untuk majalah WBC dapat berupa foto, karya sastra baik puisi, komik, cerita pendek, ataupun cerita bersambung. Kirimkan karya ke [wartabeacukai@gmail.com](mailto:wartabeacukai@gmail.com).

Selamat membaca!  
Pimpinan Redaksi  
**Deni Surjantoro**

Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi  
Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga  
Direktorat Jendral Bea dan Cukai - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah Warta Bea dan Cukai.  
Kirim ke [wartabeacukai@gmail.com](mailto:wartabeacukai@gmail.com)  
Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat di hubungi, serta menuliskan nama dalam kolom subyek surat elektronik.

### ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur  
Telp. (021) 489 0308 Ext. 222  
E-mail : [wartabeacukai@gmail.com](mailto:wartabeacukai@gmail.com)

[f](https://www.facebook.com/WartaBeaCukai) WartaBeaCukai [@Warta\\_BeaCukai](https://www.instagram.com/Warta_BeaCukai)



Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
Heru Pambudi, S.E., LLM

### PENASEHAT

**SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI**  
Dr. Kushari Suprianto, M.M., M.E

**DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN**  
R. Fadjar Donny Tjahjadi, S.E., M.Si.

**DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN**  
Robi Toni, S.E., M.M.

**DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI**  
Drs. Marisi Zainudin Sihotang, SH, M.M.

**DIREKTUR KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN**  
Ir. Rahmat Subagio, M.A.

**DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI**  
M. Agus Rofudin, S. Kom., M.M.

**DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL**  
Hendra Prasmono, S.H., M.IH

**DIREKTUR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI**  
Nirwala Dwi Haryanto, S.E., M.Si.

**DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN**  
Ir. B. Wijayanta Bakti Mukarta, M.A

**DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS**  
Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si

**TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI**  
Dwijio Muryono

**TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI**  
Nugroho Wahyu Widodo, S.S.T., Ak.

**TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI**  
Ambang Priyonggo, S.IP., M.P.A.

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI**  
Ir. Harry Mulya, M.Si.

### PENGARAH

**DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA**  
DR. Robert Leonard Marbun, SIP, MPA

### PEMIMPIN REDAKSI

**KASUBDIT KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI**  
Deni Surjantoro

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**  
Muchamad Ardani, Budi Sulistiyo, Sudiro, Devid Yohannis Muhammad

**REDAKTUR**  
Yella Meisha Indika, Dara Rahmania, Nur Iman, Rezky Ramadhani, Muhammad Faizur, Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawatari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Syahroni, Supriyadi Widjaya

**DESAINER GRAFIS DAN LAYOUTER**  
Deo Agung Sembada, Shifa Nabila Mustika H., Henry Mahardhika P., Patri Yanto Mission

**FOTOGRAFER**  
Slamet Rahardi, M. Faishal Hafizh, Jodie Umbara, M. Khamil Hamid, Okta Anang Diantama, Septian Dawang Kristanto, Adhitya Riandhika Hermawan, Nurcholis Efendi, Deo Agung Sembada, Rahmad Pratomo Digdo, Dovan Wida Perwira, Rian Effendi, Fauziah Nur Ramadhan, Ria Al Whali Rismaya

**SEKRETARIAT**  
Rahmad Pratomo Digdo, Kartika, Nur Hani Rahmawati, Reinaldo, Mustamiludin, Dadan Heriyana, Satrio Bayuwinsu, Shofa Aufar Rahman

4

**TRAVEL NOTES**

Punthuk Mongkrong - Menikmati Keindahan Alam 360 Derajat Dari Ketinggian 624 Mdpl

6

**PROFIL KANTOR**

Bea Cukai Gorontalo - Banyak Potensi dan Peluang bisa berdampak langsung pada penerimaan

13

**BC MENJAWAB**

Terkait Tarif Bea Masuk

14

**PERATURAN**

Tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha

15

**SOSOK**

Nisfu Chasbullah dan Olahraga Dirgantara

18

**LAPORAN UTAMA**

Pemerintah Luncurkan Program Perizinan Online "Kita Ingin Bersaing dan Berkompetisi Dengan Negara Lain"

The Government Launches Online Licensing Program "We'd Like to Compete with Other Countries"

28

**WAWANCARA**

Untuk Mampu Bersaing Dengan Negara Lain, Indonesia Memerlukan Kemudahan Perizinan Berusaha

33

**LAPORAN KHUSUS**

Sinergi DJBC dan DJP Untuk Optimalisasi Penerimaan

38

**FEATURE**

Bea Cukai Berantas Rokok Ilegal Dengan Operasi Gempur

42

**SISI PEGAWAI**

Teddy Triatmodjo dan Ketertarikannya dengan Dunia Komunikasi dan Kehumasan

46

**BERBAGI PENGETAHUAN**

Inggris Perangi Candu Frozen Spice

48

**KESEHATAN**

Kerusakan Gigi Anak Yang Disebabkan Oleh Kebiasaan Buruk

50

**GALERI FOTO**

56

**RAGAM**

Di Perbatasan - Budhi Setyawan

# Punthuk Mongkrong

*Menikmati Keindahan Alam 360 Derajat Dari Ketinggian 624 Mdpl*

Punthuk Mongkrong memiliki ketinggian sekitar 624 Mdpl yang diklaim sebagai Punthuk tertinggi mengalahkan Punthuk Setumbuk, Punthuk Sukmoyo, serta Punthuk Gupakan.

Tak hanya Candi Borobudur, yang sudah kesohor di seantero dunia, Magelang punya destinasi wisata lain yang juga layak kita kunjungi. Punthuk Mongkrong, mungkin namanya sedikit asing di telinga jika dibandingkan dengan Punthuk Setumbuk yang tiba-tiba terkenal karena menjadi salah satu lokasi syuting film AADC. Punthuk Mongkrong juga menawarkan keindahan yang dijamin tak akan mengecewakan para wisatawan yang sudah bersusah payah untuk mencapai puncak Puthuk Mongkrong.

Kalau ingin tahu arti nama Punthuk Mongkrong, Punthuk sendiri memiliki arti tanah yang mawur, tidak padat, dan tak bisa diurai layaknya pasir, sekitarnya tak ditumbuhi rumput atau pohon. Alasan inilah yang menjadi penamaan Punthuk Mongkrong.

Punthuk Mongkrong berada di desa Giritengah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Terletak 6 km di sebelah selatan Candi Borobudur dan berada di ketinggian 624 mdpl yang merupakan Puthuk tertinggi di antara punthuk-punthuk yang lain di daerah sekitar candi Borobudur.

Karena Punthuk tertinggi, maka dari itu pengunjung dapat dengan puas menikmati keindahan matahari terbit di balik dua gunung yaitu gunung Merapi dan gunung Merbabu. Dan saat matahari terbenam di balik perbukitan Menoreh.

Di kawasan ini kita disediakan berbagai wahana untuk pengunjung berekspresi sesuai keingannya antara lain jembatan yang berbentuk huruf "V", rumah pohon dan beberapa gazebo untuk beristirahat.

Pada waktu-waktu tertentu, berada di Punthuk Mongkrong serasa berada di atas lautan kabut, makin menambah keelokan Punthuk Mongkrong. Begitu juga untuk menikmati indahnya pemandangan saat malam hari, di Punthuk Mongkrong pengunjung dapat menentukan waktu kapan saja berkunjung ke lokasi ini, bisa sore hari untuk menikmati *sunset*, pagi hari untuk menikmati *sunrise* maupun siang hari untuk menikmati pemandangan lepas 360 derajat.

Kalau malam hari kita bisa menikmati pemandangan malam yang indah dari atas Punthuk Mongkrong, melihat taburan bintang di langit dan nyala lampu di sekitar dari atas bukit makanya ada sebutan untuk malam hari di Punthuk ini dengan sebutan Bukit Bintang.

Selain Punthuk Mongkrong, potensi Desa Giritengah yang bisa menarik para wisatawan adalah pasar pagi, sanggar musik tradisional, kerajinan topeng kayu, kerajinan anyam bambu, kerajinan ukir bambu dan air terjun. **(Ariessuryantini)**





# Bea Cukai Gorontalo

Banyak Potensi  
dan Peluang  
Bisa Berdampak  
Langsung Pada  
Penerimaan

Dikenal dengan sebutan Bumi Serambi Madinah, Gorontalo resmi menjadi sebuah provinsi pada tahun 2001 dengan masyarakatnya yang agamis dan mayoritas beragama Islam. Gorontalo, sebelumnya merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Utara. Di sebelah barat, Gorontalo berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara, serta dua perairan laut, yaitu Laut Sulawesi di sebelah utara berbatasan langsung dengan perairan Filipina dan Teluk Tomini di sebelah selatan.

Di kota inilah terdapat Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo dengan wilayah pengawasan meliputi 1 kotamadya dan 5 kabupaten yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Boalemo. Serta terdapat 6 pos pengawasan Bea Cukai, yang terdiri dari 5 pelabuhan laut dan 1 bandar udara, meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo yang luasnya kurang lebih 12.435 km<sup>2</sup>. Titik terjauh pengawasan berada di Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato dengan jarak kurang lebih 280 km dari Bea Cukai Gorontalo.

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Gorontalo, **Dede Hendrajaya**, Provinsi Gorontalo memiliki dua akses laut yang memungkinkan disandari kapal kargo, yakni Pelabuhan Kota Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara untuk melakukan ekspor impor yang hanya bisa dilakukan di dua pelabuhan tersebut. Ekspor didominasi komoditi yang tidak terkena bea

keluar dan kegiatan impor, walaupun terdapat komoditi yang terkena bea masuk, namun mayoritas memanfaatkan preferensi tarif dan fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga pemungutan bea masuk tidak dapat dilakukan. Kegiatan ekspor impor lebih banyak dilakukan di Pelabuhan Anggrek dibandingkan dengan Pelabuhan Kota Gorontalo, hal ini dikarenakan kondisi Pelabuhan Kota Gorontalo hanya bisa disandari kapal yang memiliki *gross tone* dibawah 4000MT.

Target dan realisasi penerimaan yang dibebankan kepada Bea Cukai Gorontalo pada tahun 2016 ialah dari sektor bea masuk ditargetkan sebesar Rp 4.045.713.009,00, dan dapat terealisasi melebihi target yakni sebesar Rp 9.636.356.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Paguwat. Di tahun 2017, Bea Cukai Gorontalo sempat dibebankan target dari sektor bea masuk sebesar Rp 4.952.197,00, namun sampai akhir tahun tidak dapat terealisasi, dikarenakan ternyata pada tahun tersebut tidak terdapat kegiatan importasi yang berdampak langsung terhadap penerimaan bea masuk.

Pada sektor cukai, kantor ini dibebankan target sebesar Rp 81.984.00,00 dan dapat

terrealisasi melebihi target, disebabkan adanya pabrik pengolahan barang kena cukai (BKC) berupa tembakau iris (TIS) yang menyumbang penerimaan sebesar Rp 97.036.800,00. Pada tahun 2018, dengan pertimbangan bahwa kegiatan importasi di Gorontalo didominasi oleh komoditi barang yang preferensi tarif bea masuknya 0%, serta belum adanya calon importir baru yang berpotensi melakukan kegiatan impor untuk jenis barang yang dikenai bea masuk, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian Utara Nomor KEP-19/WBC.18/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2018, Bea Cukai Gorontalo diberikan target hanya di sektor cukai dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00, sedangkan target dari sektor bea masuk dan bea keluar sebesar Rp 0.

“Kami optimis target tersebut dapat tercapai karena berdasarkan informasi yang kami dapat, akan dilakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tomilito yang kemungkinan akan dimulai pertengahan tahun 2018 dan diharapkan dapat menyumbang penerimaan dari sektor bea masuk,” ujar Dede. Dari sektor bea keluar, di Gorontalo terdapat industri pengolahan *crude palm oil* (CPO) dan turunannya yang masih dalam proses pembangunan, kedepannya diharapkan akan menyumbang penerimaan dari sektor bea keluar. Sedangkan dari sektor cukai, saat ini terdapat penambahan jumlah pengusaha pabrik Hasil Tembakau Iris (TIS) dari sebelumnya hanya satu perusahaan menjadi dua. Hal tersebut secara langsung akan meningkatkan potensi penerimaan dari sektor cukai hasil tembakau.

Sedangkan dari sektor perpajakan, lanjut Dede, pihaknya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) pada tahun 2016 sebesar Rp 45.112.756.000,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 10.327.287.000,00. Sedangkan dari sektor denda sebesar masing-masing Rp5.000.000,00 pada tahun 2016 dan Rp 5.000.000,00 pada 2017.

## Upaya Pemenuhan Target, Tantangan, dan Peluangnya

Mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi target yang telah dibebankan kepada kantor ini, Dede menjelaskan, untuk sektor kepabeanan pihaknya berkomitmen mengoptimalkan pengawasan melalui pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen terhadap barang impor, sehingga tidak ada potensi penerimaan yang hilang. “Kami juga selalu mendorong agar kegiatan impor dan ekspor dapat dilakukan langsung di Gorontalo dengan memberikan sosialisasi mengenai kemudahan pelayanan kegiatan ekspor dan impor dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.”

“Selain itu, kami juga melakukan pembinaan langsung terhadap industri-industri yang sedang berkembang di Gorontalo, seperti PLTU dan Pabrik Pengolahan CPO dan turunannya, sehingga jika terdapat kendala yang dihadapi oleh pengusaha, khususnya dalam kegiatan ekspor dan impor dapat segera teratasi,” ungkapnya.

Sedangkan dari sektor cukai, pihaknya lebih proaktif dalam penerbitan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC), khususnya untuk produsen hasil tembakau, sehingga pengguna jasa yang bersangkutan dapat segera menjalankan usahanya. Sementara dari sisi pengawasan, Bea Cukai Gorontalo telah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal dengan harapan dapat meningkatkan minat pengusaha hasil tembakau legal agar semakin berkembang. “Kami juga telah membentuk tim gabungan bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo yang diharapkan dapat menggali potensi-potensi penerimaan, baik dari sisi kepabeanan dan cukai, maupun perpajakan. Upaya-upaya tersebut di atas, kami yakini dapat berdampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan,” imbuh Dede.

Dalam pemenuhan target, tentunya ada tantangan dan peluang, mengenai hal itu Dede menjelaskan, tantangan yang dihadapi dalam

pemenuhan target yang telah ditetapkan dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor kepabeanan dan sektor cukai. Dari sektor kepabeanan, tantangan utama yang dihadapi adalah masih terdapat kondisi di mana pengusaha lebih memilih melakukan kegiatan impor maupun ekspor melalui daerah lain, sehingga tidak ada kontribusi langsung terhadap penerimaan Bea Cukai Gorontalo. Kemudian dari sektor cukai, tantangan yang dihadapi adalah realisasi penerimaan sangat tergantung dari lancar tidaknya usaha dari pengusaha BKC. Ketika perusahaan tersebut mengalami masalah dengan kegiatan operasional atau permasalahan internal lain, maka secara otomatis pemesanan pita cukai menurun bahkan terhenti dan berpotensi mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan.

Sedangkan beberapa potensi yang bisa menjadi peluang penerimaan, khususnya di masa yang akan datang antara lain, kemungkinan ditetapkannya Bandara Djalaluddin menjadi bandara internasional, sehingga dimungkinkan adanya impor barang penumpang maupun barang kiriman. Peluang adanya Pos Lalu Bea di Gorontalo, peluang ditetapkannya Pelabuhan Angrek sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, potensi ekspor yang lebih banyak dan bervariasi, seperti ekspor CPO dan produk turunannya dan hasil tambang, serat peluang bertambahnya produsen tembakau iris sebagai dampak dari ditekannya peredaran hasil tembakau ilegal. Dari kondisi tersebut diharapkan dapat berdampak langsung terhadap meningkatnya penerimaan Bea Cukai Gorontalo.

## Kegiatan dan Wilayah Pengawasan

Pengawasan di Bea Cukai Gorontalo pada dua tahun terakhir menghasilkan beberapa penindakan di sektor cukai, yakni sebanyak 17 penindakan pada tahun 2016 dan 14 penindakan pada tahun 2017 dengan total potensi kerugian negara selama dua tahun tersebut sebesar Rp 202.622.800,00. Rata-rata pelanggaran terjadi di sektor cukai di mana kegiatannya berada di wilayah darat provinsi Gorontalo, oleh karena itu fokusnya adalah pengawasan di darat terkait peredaran BKC ilegal.



**Dede Hendrajaya**  
Kepala Kantor Bea Cukai Gorontalo

Untuk wilayah pengawasan laut pada Bea Cukai Gorontalo, meliputi Laut Sulawesi bagian utara yang berbatasan langsung dengan Filipina dan Teluk Tomini di bagian selatan. Meskipun Bea Cukai Gorontalo tidak memiliki pengawasan laut, namun tetap dilakukan pengawasan secara preventif atas kemungkinan terjadinya penyelundupan di daerah pesisir bersamaan dengan pelaksanaan pengawasan dan penindakan di bidang cukai. Kegiatan tersebut berupa patroli darat secara berkelanjutan di sepanjang pesisir pantai utara pada Kabupaten Gorontalo Utara dan pantai selatan pada Kabupaten Bone Bolango.

Untuk kegiatan pengawasan darat yang dilaksanakan di Bea Cukai Gorontalo meliputi pengawasan kepabeanan dan cukai berupa kegiatan *surveillance*, patroli darat, dan operasi penindakan. *Surveillance* merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan

Cukai, patroli darat merupakan upaya petugas untuk mencegah adanya pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai yang bersifat preventif. Sedangkan operasi penindakan adalah kegiatan represif terhadap pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai melalui operasi pasar, operasi tangkap tangan, dan upaya hukum lainnya.

Mengenai tantangan dalam hal pengawasan, Dede menjelaskan, dalam pelaksanaan di lapangan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Bea Cukai Gorontalo. Pertama, luas wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah personil pada unit pengawasan maupun keseluruhan kantor sehingga harus melibatkan unit lainnya untuk melaksanakan tugas pengawasan. Kedua adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum.

## Sumber Daya Manusia

Berbicara tentang sumber daya manusia (SDM) di Bea Cukai Gorontalo, berdasarkan komposisi pegawai, Bea Cukai Gorontalo diperkuat dengan 31 orang personil dengan sebaran usia cukup bervariasi, antara lain Generasi X (1965-1980) 41.9%, Generasi Y (1981-1994) 25.8%, dan Generasi Z (1995-2010) 32.3%, sehingga membutuhkan pendekatan komunikasi yang berbeda setiap generasinya, terutama saat menjalankan tugas dan fungsi dalam melakukan pelayanan dan pengawasan. Untuk tingkat pendidikan bervariasi mulai dari tingkat pendidikan SMA hingga S2.

Sedangkan untuk pengembangan kemampuan diri, selaku Kepala Kantor, Dede selalu berusaha memberikan kesempatan kepada anggotanya mengembangkan kemampuan diri seluas-luasnya sesuai *passion* masing-masing. Kegiatan-kegiatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Kegiatan formal contohnya, program pembinaan ketrampilan pegawai (P2KP) tiap bulan, kegiatan apel rutin satu kali dalam sebulan sebagai sarana

untuk penyampaian informasi maupun arahan dari pimpinan kepada seluruh pegawai, pembahasan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) untuk mengevaluasi kinerja dari setiap unit, melaksanakan pekan disiplin setiap 3 bulan sekali untuk menjaga tingkat kedisiplinan seluruh pegawai, memberikan kesempatan kepada setiap unit untuk mempresentasikan hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit tersebut.

Selain itu, ada program bimbingan mental yang mengundang motivator agama. “Karena menurut saya, kualitas pegawai tidak hanya dilihat dari kinerja di pekerjaan tapi juga dari mentalitas pegawai itu sendiri,” jelasnya.

Di kegiatan informal, para pegawai Bea Cukai Gorontalo aktif dalam kegiatan olahraga seperti voli, tenis meja, karate, dan futsal. Ada pula band akustik yang rutin berlatih minimal sebulan sekali, untuk menyalurkan hobi musik para anggota dan tampil pada acara-acara khusus di kantor. Program keterampilan lainnya pun tersedia seperti kursus mengendarai mobil dan pelatihan mengoperasikan *drone*. Khusus untuk

keahlian menembak mulai akan dilangsungkan akhir April ini. Kesemuanya untuk menunjang kegiatan pengawasan. Dibuka juga kesempatan bagi pegawai untuk menyalurkan hobi fotografi sehingga memiliki kemampuan mengelola media sosial dan mampu menampilkan foto maupun tulisan di media sosial yang berkualitas.

## Terobosan Baru

Terobosan yang telah dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada *stakeholder* yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Gorontalo adalah Kegiatan Pemetaan Potensi Ekonomi dan Titik Rawan yang dilakukan akhir tahun 2017. Hasil dari kegiatan pemetaan tersebut merupakan langkah awal membangun *database* yang lebih komprehensif terkait profil wilayah dan profil entitas yang terkait dengan pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai. Profil titik rawan berupa daerah pesisir dan pasar-pasar tradisional di mana dimungkinkan adanya pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai.

Hasil pemetaan kemudian dianalisis masing-masing unit, selanjutnya dituangkan dalam program kerja lebih rinci mengenai seluruh kegiatan, baik dari sisi pengawasan maupun pelayanan yang akan dilakukan Bea Cukai Gorontalo dalam periode satu tahun. Dengan memiliki *database* yang komprehensif dan program kerja terinci, diharapkan akan memudahkan pembuatan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berkualitas serta pengelolaan anggaran yang tepat. Hasil evaluasi terhadap kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Gorontalo yang berdampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan.

Kemudian juga dilakukan penguatan fisik kantor melalui penataan ruang, peningkatan kebersihan, penataan taman untuk memberikan nyaman pegawai dan pengguna jasa. Dari segi penguatan mental, dilakukan peningkatan kepedulian dan integritas sesama pegawai melalui kegiatan *capacity building*, dan acara kumpul keluarga besar Bea Cukai Gorontalo

yang diadakan sebulan sekali di halaman kantor. “Untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna jasa maupun masyarakat, kami memiliki saluran komunikasi dengan berbagai media sosial, selain media konvensional, seperti saluran telepon dan *sms gateway* yang meng-*update progress* pelayanan kepada pengguna jasa,” ujar Dede yang juga menyebutkan adanya layanan mandiri melalui perangkat komputer untuk mempermudah pengguna jasa mengajukan dokumen, sehingga dapat langsung dikerjakan dari kantor, dan pengguna jasa tidak perlu bolak-balik apabila ada kesalahan.

Dede menyatakan, pihaknya senantiasa berusaha menciptakan atmosfer kerja yang baik dan meningkatkan kenyamanan dalam bekerja, sehingga memotivasi pegawai bekerja cepat, tepat, dan maksimal. Ini diharapkan dapat dicapai dengan melakukan penguatan di internal SDM dengan cara peningkatan kompetensi pegawai terhadap pengetahuan teknis dalam bidang kepabeanaan dan cukai. Masing-masing pegawai diharapkan dapat melakukan penilaian dan evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga Bea Cukai Gorontalo siap mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di Provinsi Gorontalo, seperti peningkatan kegiatan pariwisata, embarkasi utama haji, impor dan ekspor langsung yang rutin, adanya bandara internasional, dan semakin bervariasinya upaya pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai.

“Sedangkan perubahan yang masih kami inginkan dari peningkatan sarana dan prasarana kantor antara lain, adanya lokasi khusus penyimpanan barang tegahan, peremajaan sarana transportasi, renovasi lahan parkir khusus wanita dan difabel sehingga Bea Cukai Gorontalo memenuhi standar kantor modern yang menerapkan konsep pengarusutamaan gender,” ungkapnya.

Ketika ditanya obsesinya untuk Bea Cukai Gorontalo, Dede menyampaikan sebagai unit kerja, paling utama adalah makin bervariasinya kegiatan pengawasan dan pelayanan di Bea Cukai Gorontalo, yang selama ini hanya



Capacity Building  
KPPBC TMP C Gorontalo

pelayanan di bidang ekspor-impor dari pelabuhan dan bandara serta pelayanan cukai yang masih relatif kecil baik jenis maupun kuantitasnya. Diharapkan juga Bandara Djalaluddin dapat menjadi bandara internasional, sehingga pengawasan dan pelayanan dapat dilakukan tidak hanya terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor tapi juga pelayanan dan pengawasan terhadap penumpang maupun awak sarana pengangkut. Dengan terwujudnya Bandara Djalaluddin menjadi bandara internasional, maka peluang Gorontalo untuk menjadi embarkasi utama pemberangkatan haji terbuka lebar, tidak lagi melalui Makassar.

Ia juga berharap kedepannya ada pelayanan dan pengawasan terhadap fasilitas kawasan berikat atau bentuk fasilitas lain. Selain obsesi perluasan pelayanan kepabeanan dan cukai, di bidang pengawasan, pihaknya juga memiliki tujuan untuk menciptakan *database* seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) yang berbasis internet, berisikan seluruh informasi meliputi kegiatan pengawasan, penindakan, informasi intelijen, dan titik rawan pelanggaran, sehingga nantinya *updating* dan hasil analisis dapat digunakan di manapun dan kapanpun, serta mudah dianalisis dalam rangka manajemen risiko menentukan target penindakan.

“Kami juga memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat mengenal dan memahami tentang pentingnya penegakan ketentuan kepabeanan dan cukai melalui kegiatan edukasi, patroli darat, dan sosialisasi, sehingga dapat tercipta kondisi masyarakat yang tertib dan tentunya ikut serta dalam mendorong tercapainya masyarakat Gorontalo yang lebih baik dan sejahtera,” pungkas Dede. (Ariessuryantini)



Kegiatan Apel  
KPPBC TMP C Gorontalo

## PERTANYAAN

Saat ini kami sedang mencari bea masuk untuk kode HS 84751 Saat di *search* di *website* : <http://www.beacukai.go.id/btki.html> Hasilnya adalah kosong (bukan 0)

Mohon penjelasannya, maksud kosong tersebut bagaimana. Kemudian, di mana kami bisa memperoleh keterangan tersebut secara tertulis.

Terima kasih,

Suswandari (Ms)

## JAWABAN

Sehubungan dengan pertanyaan Saudari terkait tarif Bea Masuk, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dapat kami sampaikan bahwa pos tarif nasional yang berlaku di Indonesia berada pada tingkat 8 (delapan) digit (sesuai dengan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN)), sehingga untuk mengetahui pembebanan tarif Bea Masuk suatu barang, saudara harus terlebih dahulu mengetahui 8 (delapan) digit *Harmonized System* (HS) barang tersebut;
2. Setelah Saudari mengetahui 8 (delapan) digit HS barang impor, saudara dapat melakukan pengecekan untuk pembebanan tarif bea masuk atas barang tersebut melalui:
  - a. Struktur Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk yang terdapat dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor; atau
  - b. Saudari dapat mengakses situs <http://eservice.insw.go.id/> pada menu Indonesia NTR sub menu HS Code Information kemudian pilih paramater kode hs atau deskripsi barang.
3. Berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas, terkait persoalan Saudari silakan menginput 6 digit HS code yang Saudari telah ketahui lalu silahkan didetailkan lebih lanjut sesuai dengan deskripsi barang guna mendapatkan HS code 8 Digit.

Demikian kami sampaikan, Terimakasih.

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.04/2018 TENTANG PERCEPATAN PERIZINAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA

PMK 29/PMK.04/2018 ditetapkan guna mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, antara lain:

1. Latar belakang diterbitkannya peraturan tersebut yaitu :  
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha.
2. Maksud dan tujuan Penyusunan peraturan dimaksud, yaitu
  - a. Memberikan kemudahan dan percepatan bagi pengguna jasa dalam perizinan di bidang registrasi kepabeanaan, TPB, KITE, dan pengusaha Barang Kena Cukai. dan
  - b. Mendorong peningkatan investasi dan perkembangan ekonomi nasional
3. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan dimaksud, antara lain:
  - a. Registrasi Kepabeanaan:
    1. Penelitian administrasi terhadap permohonan dilakukan oleh Sistem.
    2. Akses kepabeanaan diberikan berdasarkan permohonan yang disampaikan secara mandiri (*voluntary disclosure*).
    3. Pejabat bea dan cukai melakukan verifikasi setelah mendapatkan akses kepabeanaan (verifikasi di belakang).
    4. Janji layanan pemberian Akses Kepabeanaan 3 jam.
  - b. Perizinan TPB:
    1. Pendelegasian kewenangan perizinan kepada Kantor Wilayah agar lebih memudahkan pengusaha.
    2. Perizinan online.
    3. Perizinan terintegrasi dengan registrasi kepabeanaan, sehingga dalam hal terdapat dokumen/data yang telah dipenuhi saat proses registrasi kepabeanaan tidak perlu disampaikan kembali.
    4. Masa berlaku izin seterusnya.
    5. Janji layanan 3 hari kerja + 1 Jam.
  - c. Perizinan KITE:
    1. Perizinan online.
    2. Perizinan terintegrasi dengan registrasi kepabeanaan, sehingga dalam hal terdapat dokumen/data yang telah dipenuhi saat proses registrasi kepabeanaan tidak perlu disampaikan kembali.
    3. Janji layanan 3 hari kerja + 1 Jam.
  - d. Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai:
    1. Perizinan online.
    2. Janji layanan 5 hari kerja sejak permohonan diterima dan kesiapan dari pemohon.
    3. Janji layanan 3 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.



Bugar dan energik begitulah penampilan **Nisfu Chasbullah**, Pria kelahiran Bandung 7 September 1943. Mantan Direktur P2 yang pensiun pada tahun 2001 ini aktif dibeberapa kegiatan, termasuk di Kepengurusan Persatuan Olahraga Dirgantara Terjun Payung menjabat sebagai ketuanya. Di samping itu saat ini ia sudah tidak lagi di posisi sebagai *Vice President* Asiaia Parachuting yang sudah diganti oleh Irvan Zuladri.

“Saat ini saya sebagai *Executive Board* ASFA (Aero Sport Federation Of Asia). Sebagai Presidennya Mubarrak Al Swaliem dari Saudia Arabia. Dan Setjen ASFA-nya Sanjay dari India. Namun di FASI saya masih sebagai Ketua Pordirga Terjun Payung. Dan Indonesia baru saja menyelenggarakan *ASIANIA Safety Day* yang pertama di Asia dari sebanyak 36 negara di Asia,” ujar Nisfu.

Selepas pensiun sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tahun 2001, Nisfu sapaan akrabnya memilih untuk beristirahat selama satu tahun dari hiruk pikuk dan rutinitas kantor yang telah ia jalani selama 35 tahun. “Pensiun sebagai Direktur P2 tahun 2001, saya memilih setahun istirahat dan ingin merasakan apa yang selama ini tidak pernah saya rasakan. Ingin menikmati bagaimana rasanya pensiun katanya bisa punya banyak waktu dan itu saya rasakan dan nikmati. Kepengen naik motor, bersepeda, pokoknya olahraga, di samping juga terjun payung. Pokoknya semua saya ikuti dengan baik sesuai jadwalnya. Kalau ada waktu dengan anak-anak dan kebetulan cocok saya ikuti, seperti sepeda, berenang dan baseball dengan mereka”.

Setelah setahun benar-benar merasakan nikmatnya pensiun, kemudian terpikir oleh Nisfu untuk memulai lagi kegiatan yang sifatnya formal akhirnya tepat tahun 2002 bergabung menjadi Komisaris FedEx sampai saat ini. Karena lokasi Nisfu waktu masih bertugas kebetulan ditempatkan di bandar udara, dari situ bertemulah ia dengan Chairul Tanjung pemilik CTCORP. Kepada Nisfu, Chairul Tanjung mengajak untuk bergabung dengan jaringan usaha miliknya, itu tak

ditampik Nisfu, dan ia pun duduk sebagai *Advisor* yang berkantor di Menara Bank Mega, Mampang Jakarta Selatan.

### Setia Pada Terjun Payung

Sebagai ketua Persatuan



Olahraga Dirgantara “Terjun Payung” yang berada di bawah Federasi Aero Sport Indonesia, Nisfu punya banyak kesempatan sebesar-besarnya untuk mengabdikan dirinya dalam bidang pengembangan olahraga ini. Ia ingin klub terjun payung ada di Indonesia bisa melakukan regenerasi dan berbuat yang terbaik.



Nisfu Chasbullah

“Jadi berprinsiplah bahwa hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Jangan begini-begitu saja, coba upayakan lagi penciptaan rekor baru supaya Indonesia bisa berkiprah,” ujar Nisfu yang 4 periode atau 16 tahun memegang jabatan sebagai Ketua Pordirga Terjun Payung.

Di wilayah Asia, lanjut Nisfu, tim terjun payung Indonesia sangat diperhitungkan kemampuannya, bahkan Singapura saja untuk berguru terjun payung datang ke Indonesia. Karena itu khusus kepada Persatuan Terjun Payung Bea dan Cukai (PTPBC) apalagi dirinya mantan pegawai Bea dan Cukai merasa ikut wajib menjaga PTPBC, agar tetap eksis. Sebab disamping menjalankan tugas, hal-hal yang bisa memberikan kebaikan untuk institusi semestinya dirawat dan dijaga. Sama halnya dengan kegiatan sepeda, menyelam, sepakbola dan lain-lain.

“Saya ingin PTPBC di pertahankan keberadaannya, sebagai Ketua Pordirga Terjun Payung saya ingin memberikan kontribusi untuk generasi selanjutnya. Buatlah sesuatu yang bisa mengharumkan negara. Dan di setiap event

diupayakan bisa selalu hadir berpartisipasi. Bea Cukai satu-satunya institusi sipil yang punya klub terjun payung, harusnya Bea Cukai bangga terhadap olahraga ini,” demikian ujar Nisfu.

Menurut Nisfu, banyak filosofi yang bisa diambil dengan kita menekuni olahraga ini, yaitu akurasi. Dan kecepatan dimana hal itu juga diperlukan dalam suatu pengambilan keputusan, maka itu ada baiknya juga jika pegawai Bea Cukai bisa menyenangkan olahraga ini.

#### Perkembangan Persatuan Terjun Payung Bea Cukai

Dulu ketika Kepala Kantor Bea Cukai Kemayoran, Rusdi Reza mewajibkan pegawai Bea Cukai yang bertugas di Direktorat P2 untuk wajib mengikuti kegiatan terjun payung dan kebetulan Nisfu memang ditugaskan di P2, disitulah awal mula dirinya belajar terjun dan tertarik untuk menjadi penerjun. Memang ketika itu Bea dan Cukai memiliki pesawat sendiri yang saat ini terpajang di halaman lapangan Kantor Pusat DJBC dan Rusdi Reza lah yang menerbangkan sendiri pesawatnya bila akan melakukan penerbangan untuk terjun payung. Di Bea Cukai, ketika itu Nisfu mengamati hanya memiliki terjun statik saja, padahal ia ingin mencoba jenis terjun payung yang lain, seperti terjun bebas atau *free fall*, karena itu ia kemudian bergabung di dalam Perkumpulan Terjun Payung AVES tahun 1978 yang merupakan klub terjun payung sipil pertama dan berlokasi di Bandung.

Kegiatan terjun di luar negeri juga sering di ikutinya, baik itu kompetisi, eksebisi ataupun meeting tahunan. Harus mengikuti kegiatan itu baik regional Asia maupun tingkat dunia dikarenakan ada wadahnya FAI (Federation Aero Internationale) dan IPC (International Parachuting Commission) jadi mesti mengikuti aturan yang *up to date*,” imbuh Nisfu.

“Itulah penerjunan pertama kali oleh para pegawai Bea Cukai, saya, Wilman Simanungkalit, Endang Tata, Teguh Indrayana, Permana Agung, Roy Lino. Dan belakangan sudah mulai banyak penggemar terjun payung BC antara lain dari hasil regenerasi, antara lain Baharuddin (alm), Ricky Hanafie, Irfan Zuladry, Maman

Anurachman, Rachmat, Karmaji, Satwibowo, Vebra Faturahman, Andi, Tyono dan Ken, serta penerjun putri seperti Wisnu, Thea, Dani, Retno, Dede dan Sulan. Bahkan karena terjun payung ini, tim Indonesia yang berjumlah 100 orang yang berasal dari 27 negara berhasil memecahkan rekor di Bali. Dari Indonesia tim terdiri dari PTPBC, Kopassus, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tapi harus dibayar mahal dengan gugurnya Theo Mandagi dalam penciptaan rekor tersebut,” kenang Nisfu.

#### Mengendalikan Diri Mengingat Usia dan Kemampuan Fisik

Sudah kurang lebih 7 tahun, Nisfu meninggalkan hobinya, ia sadar usia dan kemampuan fisiknya sudah tidak seperti muda dulu, di samping juga kesibukannya di beberapa perusahaan yang kini ia geluti. Diakuinya dalam melakukan terjun payung saat pengambilan keputusan (*decision maker*) sudah mulai lambat dan bisa jadi akan membahayakan dirinya, jadi kini yang tepat dilakukannya adalah lebih menguasai diri.

“Saya juga sudah mulai menerbangkan pesawat, tapi masih didampingi, belum solo, hasil sekolah singkat pilot penerbang di Deraya untuk menerbangkan pesawat ringan Cessna. Namun lagi-lagi hal itu terpaksa harus saya ikhlaskan juga untuk tidak menerbangkan pesawat lagi, karena permintaan keluarga, akibat beberapa waktu yang lalu tiga kali berturut-turut terjadi kecelakaan pesawat ringan, salah satunya dari Semarang ke Halim PK yang sampai saat ini belum ditemukan. Akhirnya keluarga memberikan pilihan pada saya, masih mau main pesawat dan terjun payung atau anak dan keluarga? Ya kalau sudah pilihan demi anak, pastinya saya tidak bisa menolak, setelah pertimbangan matang akhirnya sejak saat itu saya berhenti, terjun dan pilot dan sekali lagi lebih untuk mengendalikan diri,” urai Nisfu yang juga sempat menekuni hobi menyelam.

Diakuinya, waktu pertama harus berhenti, agak berat toh akhirnya ia tinggalkan juga dan memilih olahraga yang ringan saja, seperti bersepeda, berenang atau menemani anaknya bermain baseball. “Meski sudah stop, kalau melihat para penerjun melayang di udara tetap saja keinginan itu ada, tapi saya sadar diri kemampuan fisik saya sekarang dan sejauh ini peran yang bisa saya lakukan sebagai bentuk cinta saya pada olahraga dirgantara ini adalah dengan memberikan masukan dan konseling buat teman-teman penerjun serta duduk di kepengurusan olahraga ini, baik untuk Indonesia maupun kepengurusan tingkat Asia,” ungkap Nisfu yang selalu menerapkan disiplin di segala hal. (Ariessuryantini)





## Pemerintah Luncurkan Program Perizinan Online

**“Kita Ingin Bersaing dan Berkompetisi Dengan Negara Lain”**

Perkembangan perekonomian dunia yang kian hari kian pesat, tentunya membutuhkan strategi dan kebijakan yang jitu agar perekonomian dalam negeri dapat terus tumbuh mengikuti tren yang ada saat ini. Kemudahan, kecepatan, dan ketersediaan bahan baku menjadi prioritas utama dalam perdagangan agar mendukung iklim investasi dan perdagangan dalam negeri. Persaingan yang kian ketat ini rupanya tidak hanya dialami oleh antar negara tapi juga sudah merambah ke antar individu dan menjadi realitas sehari-hari yang mau tidak mau hari kita hadapi.

Untuk mendukung itu semua tentunya dibutuhkan suatu kebijakan yang terarah agar persaingan ekstrim saat ini dapat dijalani bahkan dimenangi oleh bangsa Indonesia. Satu tujuan yang ingin dicapai dalam persaingan

perdagangan saat ini adalah naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat semata. Menghadapi itu semua, pemerintah kini melakukan tiga jurus agar dapat memenangi dan menghadapi kompetisi global tersebut.

Ketiga langkah tersebut *pertama*, meningkatkan iklim kemudahan berusaha. *Kedua*, meningkatkan daya saing produk ekspor. Dan *ketiga*, menciptakan diversifikasi ekspor, baik dari sisi produk maupun pasar. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menggairahkan perekonomian nasional, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk meningkatkan tingkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dengan beberapa kebijakan baru di bidang perpajakan dan bea cukai, yang diharapkan akan

## The Government Launches Online Licensing Program

**“We’d Like to Compete with Other Countries”**



The development of global economy which have been increasing vastly, requires each country to create strategy and proper policy so that the domestic market can still grow following the trend of the global market. The convenience, readiness, and availability of raw materials become priority in order to create healthy investment climate as well as to encourage the development of domestic market. This increasingly tough competition is apparently not only occurred among countries, instead it has been occurring between individuals and become a reality that we need to embrace.

In order to establish the system, a targeted and selective policy is required, thus Indonesia will be able to compete even to win against other countries in the competition. The purpose of trading competition aims for the growth of economic development for the sake of people’s welfare. Facing those challenges, the government has released three policies for facing and winning the global competition.

Firstly, improving ease of doing business in Indonesia. Secondly, improving the competitiveness of export goods. And, thirdly, creating export goods diversification, based on market and goods classification. As a part of the government’s effort for improving the ease of doing business and stimulating

national economic growth, Ministry of Finance have committed to improve the ease of doing business by establishing several new policies on taxes, and customs and excise, which is expected to provide better legal certainty, improve the ease of doing business, as well as boost tax administrative efficiency.

Tax related regulation is established by implementing tax holiday, tax allowance, and tax restitution acceleration, joint inspection of profit-sharing contract, and simplification of exemption procedure of value added tax, and value added tax on luxury goods for ambassador and international agency. On the other side, the government has also committed to simplify the procedure of customs and excise service by establishing online customs licensing, developing Bonded Logistic Zone Generation 2, increasing the number of Authorized Economic Operator (AEO) certification recipient, and providing incentives for Small-Medium Enterprises.

The online customs licensing program was launched by President of Republic of Indonesia, Ir. Joko Widodo at 27<sup>th</sup> of March 2018, which took place at PT. Samick Indonesia in Bogor. This program is established in order to provide business certainty as well as to create ease of doing business, specifically for bonded zone.

meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kemudahan berusaha, serta mendorong efisiensi administrasi perpajakan.

Adapun kebijakan dalam perpajakan dituangkan dalam kebijakan *tax holiday*, *tax allowance*, percepatan restitusi, pemeriksaan bersama kontrak bagi hasil, serta penyederhanaan prosedur pembebasan PPN/PPnBM bagi perwakilan negara asing dan badan internasional. Di sisi lain, komitmen mempermudah prosedur pada bea cukai dituangkan dalam pemberian fasilitas perizinan online kepabeanaan, pengembangan pusat logistik berikat Generasi 2, menambah sertifikasi pengguna *Authorized Economic Operator* (AEO), dan insentif bagi UMKM.

Peluncuran program dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. pada 27 Maret 2017, lalu tepatnya di PT. Samick Indonesia, Bogor. Program ini ditujukan untuk memberikan kepastian berusaha dan menciptakan kemudahan berusaha bagi pengusaha dengan adanya program fasilitas perizinan online kepabeanaan khususnya untuk kawasan berikat.

Dalam acara yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Presiden hadir bersama beberapa Menteri Kabinet Kerja serta pimpinan lembaga. Pada sambutannya Presiden mengatakan kemudahan perizinan secara online ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain. "Ini kita ingin bersaing, berkompetisi dengan negara lain. Saat ini kita fokus investasi dengan tujuan ekspor dengan semudah-mudahnya. Kita butuh 2 hal yang bisa pengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Pertama investasi, kedua ekspor," ungkapnya di hadapan 3000 pengguna fasilitas kepabeanaan.

"Di zaman yang serba cepat ini, masyarakat membutuhkan suatu metode yang praktis. Saya ingin mengingatkan betapa zaman sudah berubah, sekarang kita maunya cepat. Ada perubahan-perubahan yang sangat cepat, oleh sebab itu sangat kuno kalau saat ini masih

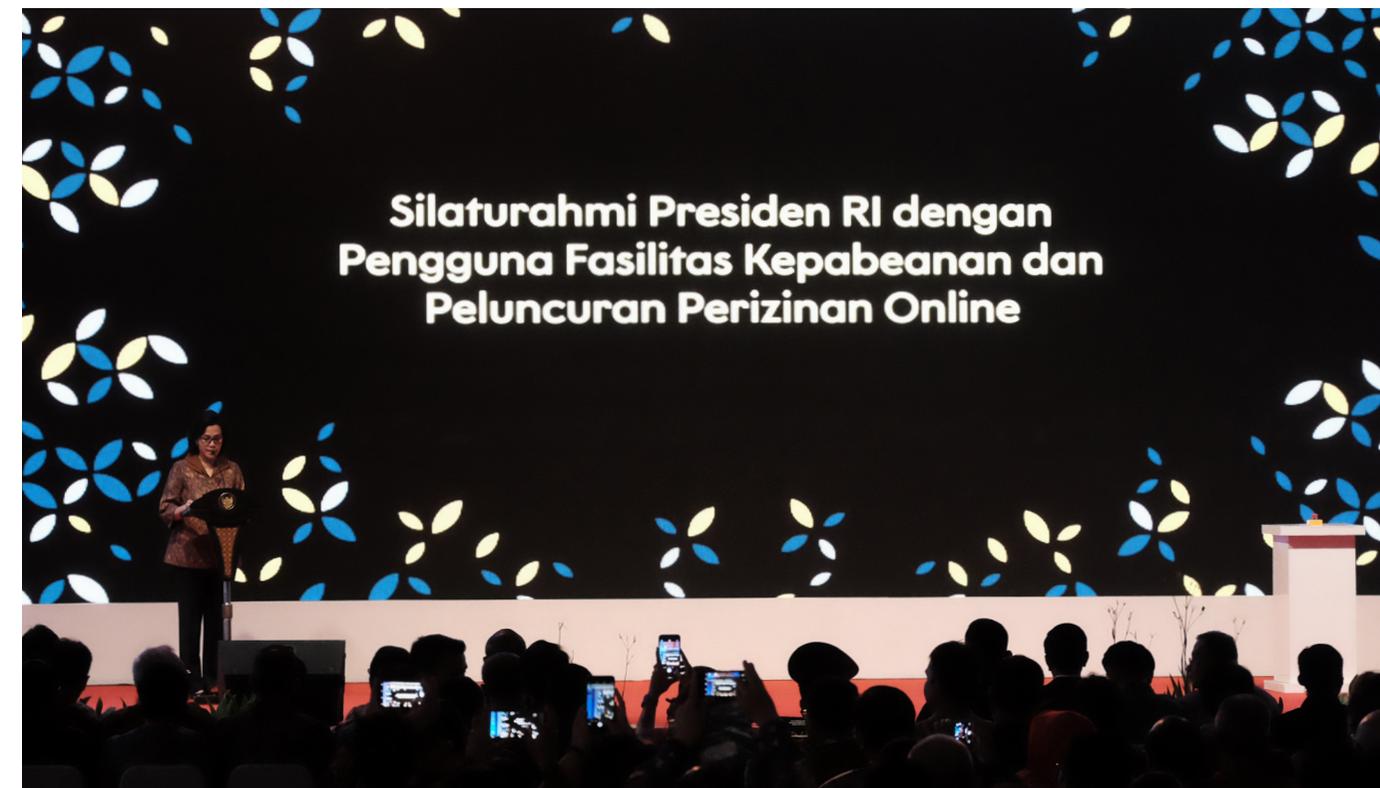
mengisi formulir kepabeanaan secara manual, sudah saatnya proses perijinan termasuk kepabeanaan ke era yang sama yaitu singkat, cepat dan online. Peluncuran perizinan online merupakan inovasi yang sangat baik," sambungnya.

Kemauan untuk berubah seiring kemajuan teknologi dan tuntutan global ini, membuat presiden memberikan apresiasi terhadap terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan khususnya DJBC yang telah menciptakan iklim kemudahan dalam berusaha melalui peluncuran perizinan online kawasan berikat. Melalui peluncuran aplikasi ini, izin kawasan berikat yang tadinya dapat diperoleh maksimal 10 hari kerja, kini hanya menjadi 1 jam.

Ke depan, kemudahan lainnya yang akan dilakukan adalah simplifikasi dokumen persyaratan, dan penghapusan 45 izin transaksional di kawasan berikat dan diganti hanya dengan 3 izin yang diajukan secara online, serta percepatan janji layanan dari 5 hari menjadi 1 hari. Bahkan untuk fasilitas perizinan online ini juga telah tertuang dalam kebijakan Menteri Keuangan, tepatnya pada Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanaan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha.

Presiden mengingatkan khususnya kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai agar semua perizinan bisa dilakukan secara online. Menurutnya hal ini merupakan tuntutan di era modern yang serba cepat dan bisa dilakukan di mana saja. Harapannya tidak ada lagi pengurusan dokumen kepabeanaan dengan setumpuk kertas, tapi bisa dialihkan secara digital.

Dalam acara peluncuran perizinan online tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga memberikan pemaparan terkait hasil pengukuran dampak ekonomi fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Hasil pengukuran dampak



In the event, which was held by Directorate General of Customs and Excise (DGCE), the President, along with several Ministries of his Cabinet as well as Director of Agencies, attended the launching event. In his remark, the President said that the online licensing system aims for improving Indonesia's competitiveness compared to other countries.

"We'd like to compete with other countries. Currently, we focus on increasing investment for the purpose to encourage export of our goods. We need two factors which can affect Indonesia's economic growth. Firstly investment, secondly higher export rate," President said, in front of the 3000 customs facility users, during that event.

"In this rapidly changing era, people need practical methods on doing business. I'd like to remind all of you that in this vastly developing era, we want everything to be fast. Therefore, we need to leave the old way behind such as manually submitting customs documents. It is

the time where processing clearance, including customs permits must be done effective and efficient. The launching of online customs licencing program is a remarkable innovation," Joko Widodo continued.

The desire to improve, along with the advancement of technology as well as global demands, makes the President gives the appreciation towards the breakthrough made by Ministry of Finance, specifically DGCE which has created ease of doing business for domestic market through the launching of online licencing program for Bonded Zone. This application will allow to process the Bonded Zone license in just an hour, from previously 10 work days.

In the future, DGCE will provide the facility such as procedures simplification, and omitting 45 transactional licenses in Bonded Zone, which later will be replaced by only 3 online licenses, as well as accelerating service agreement from 5 days to only 1 day. These facilities have been regulated in Ministry of Finance Regulation



ekonomi fasilitas KB dan KITE untuk tahun 2016 di antaranya adalah berkontribusi terhadap ekspor nasional sebesar USD 54,82 miliar atau 37,76 persen dari ekspor nasional.

Dampak lainnya adalah, rasio ekspor terhadap impor nasional sebesar 3,04 kali. Menarik investasi mencapai Rp 168 triliun. Menyerap tenaga kerja sebesar 2,1 juta orang atau setara dengan 13,5 persen tenaga kerja industri nasional. Menambah penerimaan negara (pajak pusat) sebesar Rp 64,94 triliun dan pajak daerah sebesar Rp 8,7 triliun. Serta berkontribusi terhadap PDB sebesar 3,59 persen. Seluruh kegiatan ini merupakan hasil kerja sama DJBC dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kebijakan lain yang juga turut diluncurkan pada acara tersebut, adalah kebijakan pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) generasi kedua (G2), yang mana sejak peluncuran pertamanya

pada 10 Maret 2016 lalu, PLB telah dinilai memberikan banyak manfaat, misalnya peningkatan efisiensi biaya logistik perusahaan yang berimbas baik pada penurunan *dwelling time*, penurunan biaya penimbunan barang dari yang semula dilakukan di luar negeri maupun penurunan biaya penelusuran teknis dari yang semula harus dilakukan di luar negeri.

Ke depannya, melalui kebijakan PLB G2, PLB akan dikembangkan menjadi 8 bentuk yaitu PLB industri besar, PLB industri kecil dan menengah, PLB barang jadi, PLB *e-commerce*, PLB bahan pokok, PLB *hub* kargo udara, PLB *floating storage*, dan PLB bursa komoditas.

Beberapa *cost efficiency* yang telah dihasilkan adalah penghematan sewa tempat penimbunan oleh importir alat berat yang mencapai USD 5,1 juta per tahun, pemotongan biaya *freight* dari satu pengguna PLB (dari 2-3 *vessel* menjadi hanya 1 *vessel*), penurunan biaya *storage*,

number 29/PMK.04/2018 in Customs and Excise Licensing Acceleration in Order to Improve Ease of Doing Business.

The President also instructs DGCE and Directorate General of Taxes (DGT) to make online system for all the licensing procedures. According to him, the online system for licensing process which is fast and always available, has become global demand in this modern era. The President also hopes that there is no longer manual system, such as using submitting paper documents for processing customs clearance, instead it can be processed digitally. During the launching event, Minister of Finance, Sri Mulyani Indrawati, also had a chance to present the result of economy impact from Bonded Zone facility and Import Facility for Export (KITE) measurement. The result showed that in 2016, these facilities had contributed to 37,76% of national export or worth of USD 54,82 billion.

The other impact from these facilities were also mentioned, namely the growth of national export activities ratio is 3,04 times compared to import activities; absorbing 2.1 million workforces or equivalent to 13.5 percent of the national industrial workforce; increasing state revenue worth of Rp64,94 trillion of tax revenue, and Rp8,7 trillion of local tax revenue; as well as contributing to 3,59% of Gross Domestic Product (GDP). All the survey was conducted by DGCE cooperating with Fiscal Policy Agency (BKF), and Statistics Indonesia (BPS).

Another policy that was released during the event, was the development policy of Bonded Logistics Center Generation 2 (PLB G2). Since it's first launched in 10th March of 2016, Bonded Logistics Center has been providing many benefits, namely improvement of logistics cost efficiency which greatly impacts to dwelling time reduction; stockpiling cost reduction, since it was previously conducted abroad, as well as technical tracing from which previously conducted abroad.

In the future, the Bonded Logistics Center G2 policy will be advanced into 8 types of Bonded Logistics Center, namely, Bonded Logistics Center for Large Industries, Bonded Logistics Center for Small-Medium Enterprises, Bonded Logistics Center for Finished Goods, Bonded Logistics Center for e-commerce, Bonded Logistics Center for Trade Goods, Bonded Logistics Center for Air Cargo Hub, Floating Storage Bonded Logistics Center, and Bonded Logistics Center for Commodity Exchanges.

Several cost efficiency which have been made during the implementation of Bonded Logistics Center are rental savings of stockpiling place which reaches the amount of USD 5,1 million per year, freight cost efficiency from 2-3 vessels to only 1 vessel for each Bonded Logistics Center operator, storage cost reduction, goods storage cost savings amounting to Rp7,18 million/container per three months, the transfer of three warehouses as big as 12.736 square meter from Singapore to Indonesia by heavy equipment importers.



penghematan biaya penyimpanan barang sebesar Rp 7,18 juta/kontainer per tiga bulan, dan pemindahan tiga gudang dari Singapura ke Indonesia seluas 12.736 sqm oleh importir alat berat.

Di samping itu, capaian PLB generasi pertama dari tingkat okupansinya telah *full utilization*, dan menurunkan *lead time* menjadi 1,62 hari, *inventory* yang ditimbun di PLB mencapai USD 2,6 miliar dan *inventory* ex Singapura yang ditimbun di PLB mencapai USD 606 juta.

Dalam kebijakan PLB, barang yang dimasukkan dari luar negeri melalui PLB statusnya belum dianggap impor, sehingga belum terkena kewajiban sebagai barang impor. Adapun produk lokal yang akan diekspor melalui PLB statusnya telah dianggap ekspor. Dengan berkembangnya bentuk PLB, diharapkan akan semakin banyak dan semakin tinggi potensi yang dapat diraih oleh PLB Generasi 2.

Masih dalam rangkaian peresmian perizinan online, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menambah sertifikasi pengguna AEO. Hingga tahun 2017, sebanyak 80 perusahaan telah menerima sertifikasi AEO. 80 perusahaan tersebut yang termasuk ke dalam *reputable traders* bersama dengan 301 perusahaan Mitra Utama (MITA) kepabebean yang juga telah mendapatkan keuntungan lainnya seperti proses percepatan restitusi. Para *reputable traders* ini nantinya akan dapat menikmati proses restitusi yang lebih singkat di mana pada umumnya memakan waktu 1 hingga 2 tahun, maka bagi *reputable traders* hanya akan dihitung perbulan.

Perusahaan AEO dan MITA sendiri memberikan kontribusi positif kepada perekonomian Indonesia. Dari segi upaya percepatan *dwelling time*, perusahaan AEO dan MITA berkontribusi terhadap penurunan 30 persen dari waktu rata-rata *dwelling time* normal yaitu dari 3,4 hari menjadi 2,38 hari. Dari segi jumlah importasi, perusahaan AEO dan MITA berkontribusi sekitar 26,84 persen atau sekitar 265 ribu kontainer sepanjang tahun 2016.

Perusahaan AEO dan MITA kepabebean juga berkontribusi dalam efisiensi biaya penimbunan hingga mencapai 34 persen jika dibandingkan dengan perusahaan jalur hijau, hal ini dimungkinkan karena waktu penumpukan yang lebih rendah dan proses pengeluaran barang perusahaan AEO dan MITA kepabebean lebih cepat. Tak hanya itu, kontribusinya terhadap penerimaan negara mencapai 29.30 persen dari total penerimaan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada tahun 2016 yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Ke depannya, fasilitas ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional karena murah biaya logistik. Reputasi sebagai Indonesia *Trusted Partner* juga diharapkan menunjang daya saing produk ekspor Indonesia di dunia internasional.

Di kesempatan ini juga Menteri keuangan menyampaikan kalau saat ini sedang dilakukan upaya untuk melakukan *rebranding* terkait AEO sebagai salah satu upaya dari DJBC untuk dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah dari perusahaan AEO. *Rebranding* yang dilakukan dengan cara mengambil *best practice* dari beberapa negara di dunia yang telah terlebih dahulu menerapkannya.

“Ada beberapa hal yang coba diangkat dari program *rebranding* yang sedang disusun antara lain dengan mengusung tema *New look, New Regulation, New Layer, New Requirement, dan New Simplification*,” terang Sri Mulyani. *Rebranding* AEO ini diharapkan, sambung Sri Mulyani, dapat memberikan dukungan yang optimal kepada para pengguna jasa dan serta dapat meningkatkan investasi

Other than that, Bonded Logistic Center 1<sup>st</sup> Generation achievements have reached full utilization occupancy, and reduced lead time to 1.62 days. The inventory kept in Bonded Logistics Center have reached the amount of USD 2,6 billion and ex-Singapore inventory have reached the amount of USD 606 million.



Bonded Logistics Center policy has established that imported goods from foreign countries are not yet imposed to import duties. Meanwhile, domestic products which are not yet exported through Bonded Logistics Center will still be considered export goods. With the advancement of Bonded Logistics Center, it is expected there are many more potential could be achieved in Bonded Logistics Center Generation 2.

Still in the launching event, the government specifically Ministry of Finance also added the recipient of Authorized Economic Operator (AEO) certification. In 2017, there were 80 AEO operators which have received certificate. Those 80 operators are reputable traders, together with another 301 companies which have received Mitra Utama (MITA) facility, which have received other advantages such as tax restitution acceleration. The tax restitution process will only take several months instead of 1 or 2 years for non-MITA companies. AEO operators and MITA companies have contributed to the growth of Indonesia's economy. From *dwelling time* acceleration side, these companies have contributed to decrease 30% of *dwelling time* which approximately the normal time reaches 3,4 days to only 2,38

days. Meanwhile from import activities, these companies have contributed 26,84% or as many as 265.000 containers in 2016.

These companies have also contributed in stockpiling cost efficiency that reaches to 34% compared to green-line companies. It is possible

due to the shorter time of container stacking at the port as well as its release from seaport. Not to mention, their business activities, taking place in Tanjung Priok seaport, contributes 29.30% of state revenue from import duties and import related taxes in 2016.

In the future, these facilities are expected to increase Indonesia's economic growth and national development due to the lower logistic cost. It is also expected that the Indonesia's Trusted Partner companies will also boost export products competitiveness in the global market.

In this occasion, Minister of Finance also stated that currently DGCE is conducting AEO rebranding as one of the effort to increase the number of the operators. It is conducted by taking some best practices of AEO implementation from other countries.

“There are several changes from this rebranding program which is currently undergoing, namely *New Look, New Regulation, New Layer, New Requirement, and New Simplification*,” explained Sri Mulyani. It is expected, Sri Mulyani continued, that this effort will provide optimal support to customs service user, increase

dan menambah ekspor dari perusahaan-perusahaan AEO serta sebagai bukti nyata dukungan pemerintah terhadap perekonomian nasional. Masih dalam pemaparannya, Menteri Keuangan juga menjelaskan upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ekspor Indonesia adalah dengan mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sehingga mampu menjadi UKM berorientasi ekspor (UKME).

“Pemerintah terus menaruh perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi UKM dalam menembus pasar ekspor. Dibutuhkan sinergi antar instansi/lembaga untuk mendukung UMKE dalam meningkatkan nilai ekspornya, untuk itu pemerintah membentuk forum satu atap (FORSA) yang merupakan sebuah forum/media komunikasi antar pelaku ekspor dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait ekspor serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” ujar Menkeu. Lebih lanjut Menkeu menyampaikan, sinergi dan sinkronisasi layanan informasi tersebut dapat dengan mudah diakses oleh UKME karena FORSA dikembangkan dengan berbasis web/mobile aplikasi. Adapun informasi yang disediakan antara lain terkait panduan dasar ekspor impor, regulasi ekspor, akses dan informasi pasar, promosi ekspor, HS Code dan asistensi KITE-IKM.

Program lain yang juga digagas pemerintah adalah *University Network for Indonesia Export Development* (UNIED) atau jaringan perguruan tinggi untuk pengembangan ekspor Indonesia (JP2EI) merupakan jejaring dari perguruan tinggi di Indonesia yang memberi perhatian terhadap pengembangan kebijakan, riset, dan pembelajaran dalam bidang ekspor. Jejaring ini difasilitasi untuk pertama kali oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan telah diresmikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Tingginya nilai ekspor dalam negeri tentunya akan membuat perekonomian semakin baik dan membuktikan kalau Indonesia

mampu bersaing dalam kompetisi global yang semakin ekstrim saat ini. Kondisi seperti itulah yang diinginkan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, kesejahteraan yang baik tentunya akan membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat dengan kemampuan tinggi yang sangat diperhitungkan dalam persaingan global.

Begitu juga dengan kebijakan yang kini terus mengarah kemudahan dan kenyamanan berusaha, menuntut DJBC untuk terus berinovasi dalam membuat kebijakan pelayanan dan pengawasan. Mudahnya dalam mengurus perizinan akan semakin baik jika pelayanan yang diberikan juga semakin prima. Yang tentunya juga harus didukung oleh pengawasan yang ketat agar persaingan industri semakin sehat dan produk dalam negeri dapat benar-benar bersaing dengan produk luar negeri. Bertambahnya jumlah PLB juga menjadi nilai tambah untuk pelayanan dan pengawasan di DJBC yang telah memberikan kontribusi nyata baik dalam penerimaan negara maupun pengelolaan *dwelling time*. Semakin banyak industri yang menempatkan bahan baku di dalam negeri tentunya akan semakin membuat efisien pengeluaran yang selama ini ternyata lebih banyak dinikmati oleh negara lain. Tidak hanya itu, negara tetanggapun akan makin memperhitungkan Indonesia yang kini mulai banyak menelurkan kebijakan yang nyata memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berinvestasi dan berusaha.

Presiden Joko Widodo telah resmi menyatakan kalau saat ini perizinan kepabeanan sudah dapat dilakukan secara online dan hanya dalam hitungan jam semua sudah dapat selesai. Jika Kementerian Keuangan dalam hal ini DJBC sudah mampu memberikan layanan secara online dan hanya hitungan jam, tentunya Kementerian lain juga dapat membuat kebijakan yang sama sehingga sinergi dan koordinasi yang selama ini diharapkan, dapat benar-benar terwujud sehingga pengusaha dapat berinvestasi dengan nyaman di Indonesia bukan hanya slogan belaka. **(Supriyadi)**

investment, improve export activities, as well as improve national economy as it has become government's concern.

Still in her presentation, the Minister of Finance also explained other efforts by the government in increasing Indonesia's exports is by encouraging small and medium enterprises (SMEs) Indonesia to continue to increase its capacity and capability so as to become an export-oriented UKM (UKME).

The government continues to pay attention to the problems faced by SMEs in penetrating export markets. It takes synergy between agencies or institutions to support UMKE in increasing export value, for that government to form a one-stop forum (Forum Satu Atap or FORSA) which is a forum or communication media between export agents with ministries or agencies and export-related agencies as well as Indonesia Export-Import Bank (LPEI). Furthermore, Minister of Finance convey, synergy and synchronization of information service can be easily accessed by UKME because FORSA developed with web or mobile application. The information provided is related to basic guidelines of import export, export regulation, access and market information, export promotion, HS Code and KITE-IKM assistance.

Another program that is also initiated by the government is *University Network for Indonesia Export Development* (UNIED) or a network of universities for the development of Indonesian exports (JP2EI) is a network of universities in Indonesia that pay attention to the development of policies, research, and learning in the field of exports. This network is facilitated for the first time by the Indonesian Export Import Bank and has been inaugurated by the Minister of Finance and Minister of Research, Technology and Higher Education. The high value of domestic exports will certainly make the economy better and prove that Indonesia is able to compete in the increasingly extreme global competition today. Such conditions are desired by the government and people of Indonesia, good welfare would certainly bring the Indonesian society into a society with high



capabilities that are highly calculated in global competition.

Furthermore, with the policy that now continues to lead ease and comfort of trying, demanding DGCE to continue to innovate in making the policy of service and supervision. Easier in taking care of licensing will be better if the services provided are also more excellent. Which of course also must be supported by strict supervision in order to increasingly healthy industry competition and domestic products can really compete with foreign products. Increasing the number of Bonded Logistics Center is also an added value for services and supervision at DGCE which has obviously contributed both to state revenue and dwelling time management. More and more industries are placing raw materials in the country of course it will increasingly make efficient expenditure which has been more enjoyed by other countries. Not only that, neighbouring countries also will take into account Indonesia is now starting to spawn many policies that provide real ease and comfort in investing and trying.

President Joko Widodo has officially stated that currently customs licensing can already be done online and in just hours all can be done. If the Ministry of Finance in this case DJBC is able to provide online services and only a matter of hours, of course, other ministries can also make the same policy so that synergy and coordination that has been hailed can really be realized and try and be comfortable in Indonesia not just a mere slogan. **(Supriyadi)**

# “UNTUK MAMPU BERSAING DENGAN NEGARA LAIN, INDONESIA MEMERLUKAN KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA”

Robi Toni

Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC

Kementerian Keuangan Khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di awal tahun 2018 kembali mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas kepabeanan di mana kebijakan ini merupakan dambaan dari kalangan usaha dan industri yang menginginkan adanya percepatan perizinan yang didukung dengan kepastian dalam berusaha.

Kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bukan hanya memangkas waktu perizinan, namun juga mengembangkan fasilitas Pusat Logistik Berikat yang sudah ada menjadi lebih luas dan kompleks.

Untuk mengetahui latar belakang DJBC mengeluarkan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan dan pengembangan apa yang akan dilakukan untuk PLB kedepan. WBC mewawancarai Direktur Fasilitas, DJBC, **Robi Toni**. Berikut petikan wawancaranya;

*Pada 27 Maret 2018 Presiden Joko Widodo meluncurkan fasilitas perizinan online kepabeanan. Bisa dijelaskan perizinan apa saja yang diluncurkan tersebut?*

Ada beberapa perizinan yang diluncurkan dalam rangka percepatan pelayanan perizinan kepabeanan dan cukai yang didukung oleh terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai yang berisi simplifikasi persyaratan izin, pendelegasian kewenangan, cara penyampaian permohonan izin serta percepatan janji layanan, yang meliputi:

- Izin prinsip TPB dari 10 Hari Kerja menjadi 1 jam izin secara online;
- Registrasi Kepabeanan dari 5 Hari Kerja menjadi 3 jam secara online;
- Izin Prinsip KITE dari 30 hari menjadi 1 Jam;
- Izin NPPBKC dari 30 hari menjadi 3 hari (karena terkait pengawasan BKC)

Di samping itu juga mempromosikan izin transaksional di KB akan disederhanakan dari 45 macam izin menjadi 3 izin secara online;

*Sebenarnya apa yang melatarbelakangi pemerintah meluncurkan fasilitas perizinan online ini?*

Begini, pemerintah menyadari bahwa cara terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah dengan meningkatkan investasi dan ekspor. Dua hal tersebut pertumbuhannya bila dibandingkan dengan negara tetangga, kita masih tertinggal jauh sehingga pemerintah merasa perlu mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah perizinan berusaha di Indonesia dengan mengeluarkan Perpres 91/2017 yang memangkas perizinan, membentuk *OSS (Online Single Submission)* dan membentuk satgas baik ditingkat pusat, K/L maupun pemerintah daerah, dengan harapan agar dapat lebih menarik investasi dan meningkatkan ekspor nasional.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, Kementerian Keuangan melalui DJBC menindaklanjuti dengan meluncurkan perizinan online dengan tujuan meningkatkan penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia.

Di samping itu, Berdasarkan hasil survei dampak ekonomi fasilitas kepabeanan, kami memperoleh kesimpulan bahwa Fasilitas Kepabeanan memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi bagi perekonomian negara, baik dari sisi investasi, devisa ekspor, jaringan usaha serta penyerapan tenaga kerja. Dan dari kesimpulan itu, akhirnya dipandang perlu untuk mempercepat proses pelayanan perizinan terkait fasilitas kepabeanan agar Investor semakin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

*Manfaat apa yang dapat dirasakan oleh pengguna jasa dengan fasilitas perizinan online ini, dan apakah dampaknya bagi perekonomian bangsa ini?*

Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh para pengguna jasa, karena dengan proses simplifikasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat dan dampak sebagai berikut, pelayanan kepabeanan dan cukai yang lebih cepat, mudah dan simpel, memberikan kepastian bagi dunia usaha atau investor dalam pengajuan perizinan baik biaya dan waktu, dapat meningkatkan nilai investasi yang masuk ke Indonesia, peningkatan penyerapan tenaga kerja nasional seiring dengan meningkatnya nilai investasi. Peningkatan nilai ekspor nasional, peningkatan penerimaan negara (Pajak Pusat dan Pajak Daerah). Dan adanya *Indirect Economy Impact* yang dapat dihasilkan dari pemberian fasilitas.

*Bagaimana dengan pengawasan dari perizinan online ini, pada bagian apa saja yang tetap masih harus diawasi untuk pengajuan perizinan online tersebut?*

Memang untuk pengawasan masih harus dikedepankan, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dan masih harus diawasi dari peluncuran perizinan online ini adalah *pertama*, sebelumnya, DJBC menerapkan prinsip *Verify and Trust* dalam memberikan perizinan, sedangkan sekarang diubah menjadi *Trust and Verify*, sehingga pelayanan dipermudah terlebih dahulu baru kemudian di verifikasi mendalam setelahnya. *Kedua*, bagian *front desk* layanan harus menjadi perhatian, serta di bagian layanan perizinan/fasilitas baik terkait TPB, KITE, registrasi maupun NPPBKC baik di level KPPBC maupun Kantor Wilayah/KPU. Dan *ketiga*, peningkatan dan percepatan pelayanan perizinan juga harus diikuti dengan proses pengawasan yang baik dan efektif saat pemanfaatan fasilitas, agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas oleh pengguna jasa.

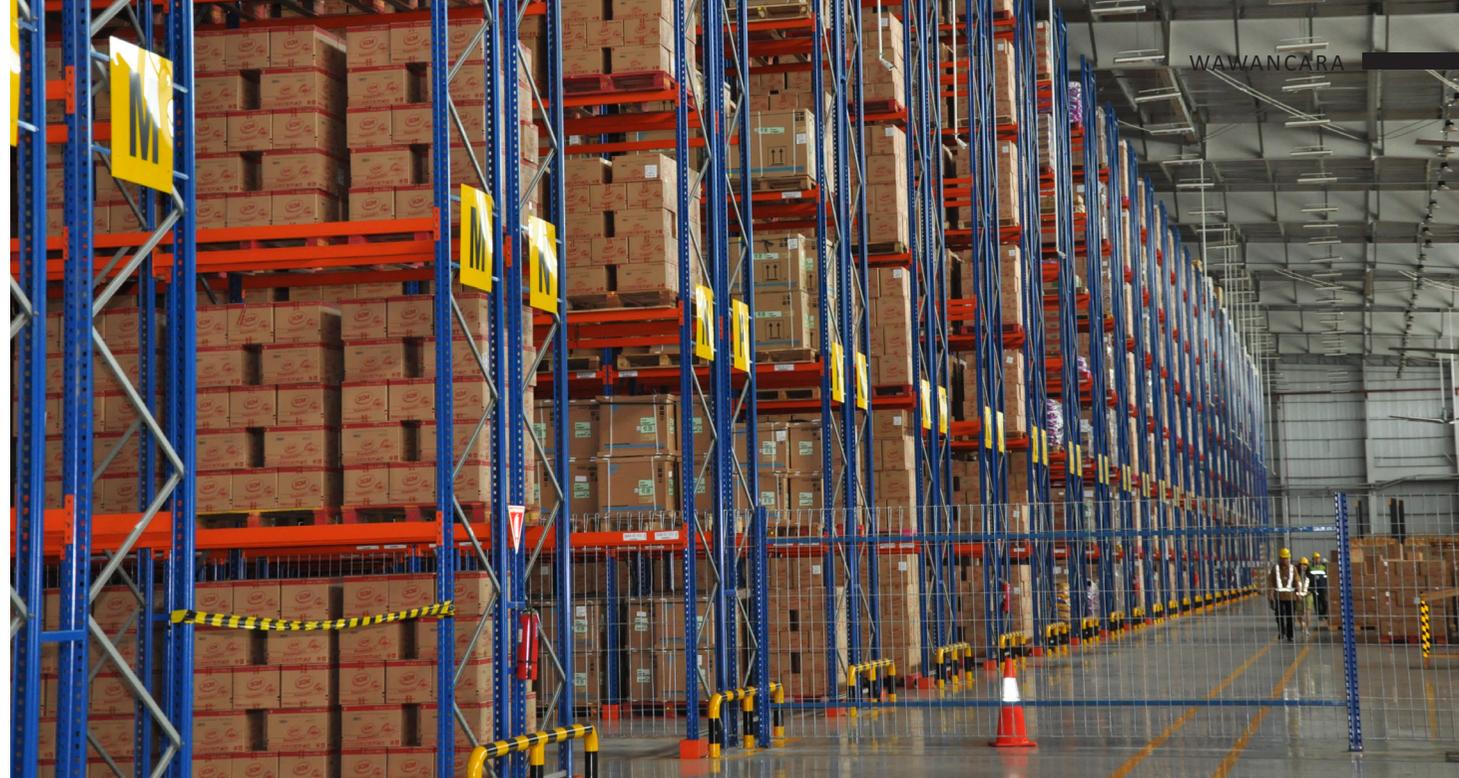
*Jika Kemenkeu c.q. DJBC dapat memberikan fasilitas perizinan online, lalu bagaimana dengan instansi lainnya yang berhubungan juga apakah sudah saling terintegrasi?*

Memang untuk saat ini, masing-masing sistem komputer pelayanan di DJBC dan instansi terkait lainnya, belum sepenuhnya terintegrasi. Namun DJBC terus aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi teknis terkait seperti, Indonesia *National Single Window* (INSW), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian ESDM dll.

Untuk bersama-sama bersinergi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan sinergis kepada pengguna jasa. Tentunya hal tersebut juga sejalan dengan sistem perizinan online sebagai tindak lanjut perpres 91/2017 yang salah satu outputnya adalah terbentuknya sistem perizinan *Online Single Submission* yang mengintegrasikan sistem perizinan lintas K/L.

*Apa tujuan dari peluncuran perizinan online tersebut?*

Kami ingin menyampaikan ke publik dan dunia usaha kalau saat ini perizinan investasi telah dilakukan perubahan mendasar dengan harapan dapat meningkatkan penanaman modal atau investasi ke Indonesia dengan beberapa cara di antaranya *pertama*, DJBC memberikan beragam skema Fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh Investor asing jika menanamkan modalnya di Indonesia, seperti fasilitas KB, PLB, GB, KITE, dll. *Kedua*, DJBC melakukan percepatan pelayanan perizinan TPB dan KITE, Registrasi serta NPPBKC agar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan *ketiga*, DJBC mengembangkan sistem perizinan online TPB dan KITE, Registrasi serta NPPBKC agar investor semakin mudah dalam mendapatkan perizinan;



*Pada kesempatan yang sama pemerintah juga meluncurkan kebijakan pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) jilid 2. Bisa dijelaskan apa keunggulan dari kebijakan PLB sebelumnya?*

Kebijakan ini juga salah satu kebijakan unggulan yang akan terus kami kembangkan. Dan untuk pengembangan layanan Fasilitas PLB Generasi 2 akan kami kembangkan bentuk PLB yang saat ini hanya ada satu bentuk, saat ini akan menjadi 8 bentuk, yaitu PLB Industri Besar, PLB IKM, PLB Hub Cargo, PLB *E-Commerce*, PLB Barang jadi, PLB Bahan Pokok, PLB *Floating Storage*, dan PLB Bursa Komoditi.

Dengan pengembangan ini, maka PLB yang tadinya dikenal sebagai gudang multifungsi untuk mendukung industri sekarang telah berkembang pemanfaatannya untuk mendukung distribusi dan efisiensi logistik bagi barang atau komoditas lainnya. Seperti distribusi barang jadi, bahan pokok serta barang-barang keperluan *e-commerce* serta mendukung bursa komoditas nasional.

Selain itu, di PLB Generasi 2 juga dilakukan delegasi wewenang pengajuan permohonan

penetapan PLB dan perubahan izinnya yang sebelumnya di Kantor Pusat Bea dan Cukai menjadi di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, sehingga akan lebih memudahkan pengguna jasa dalam mengajukan permohonan.

*Sebenarnya apakah dampak positif dari PLB bagi perekonomian saat ini?*

Dampaknya sudah sangat terasa untuk perekonomian kita, karena saat ini telah ada 55 PLB yang tersebar di 75 Lokasi di seluruh Indonesia, Selama tahun 2016-2017, Utilisasi Pemanfaatan Gudang PLB adalah sebesar 62% dengan rata-rata *Lead Time* di PLB 1,62 Hari. Total Penerimaan Bea Masuk dan PDRI dari PLB pada tahun 2016 adalah sebesar 620 Miliar rupiah dan 2.171 Miliar rupiah pada tahun 2017. Selain itu sebagai contoh Penghematan biaya timbun dan *handling* di PLB dibanding Singapura per kontainer, serta penghematan oleh importer alat berat yang menggunakan PLB adalah sebesar USD 5,1 juta per tahun. Dari data tersebut menunjukkan kalau keberadaan PLB telah mendukung penurunan biaya logistik dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

*Pada Pengembangan PLB Jilid 2 salah satu yang dikembangkan adalah PLB e-commerce. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan PLB e-commerce?*

Begitu, PLB *E-Commerce* adalah PLB untuk menimbun barang yang penjualannya dilakukan melalui *Platform E-Commerce*. Mengapa pemerintah meluncurkan kebijakan PLB *E-Commerce*, karena potensi perdagangan *E-Commerce* yang sangat besar, yaitu diperkirakan sebesar USD 130 Miliar pada tahun 2020. Untuk mengantisipasi pertumbuhan *E-Commerce* tersebut perlu disiapkan dukungan dari sisi kemudahan *supply* dan distribusi barang *E-Commerce*. Dalam PLB *E-Commerce* ada kewajiban untuk menyediakan *space* penimbunan barang *E-Commerce* produk lokal agar bisa menjadi pintu ekspor barang bagi industri kecil menengah di Indonesia.

*Pemerintah juga membentuk Forum Satu Atap (FORSA) untuk UMKE, apa yang dimaksud dengan FORSA untuk UMKE tersebut?*

Ini juga merupakan kebijakan baru, dimana Forsa adalah Forum Satu Atap berupa *platform website* yang diinisiasi oleh Indonesia Eximbank / Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan dukungan *stakeholder* terkait yang memberikan layanan informasi dan konsultasi berbasis online terkait ekspor/impor dan menjadi sarana mempertemukan pelaku UKME/Usaha Kecil Menengah tujuan ekspor hingga regulator dari sejumlah kementerian lembaga terkait ekspor-impor.

*Apa ada target lain yang sudah ditentukan oleh Presiden untuk Fasilitas Perizinan online ini?*

Ada, Presiden meminta perizinan untuk investasi dan ekspor harus dibuat lebih mudah, syaratnya tidak bertumpuk-tumpuk dan cepat dalam hitungan jam, tidak ada istilah hari, dan izin dilayani secara online. Karena bila tidak demikian pasti Indonesia kalah bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi.

Sebagai contoh Presiden melihat izin NPPBKC yang sebenarnya sudah disederhanakan dari 30 hari menjadi 3 hari kerja masih kurang cepat, diharapkan menjadi hanya hitungan jam. Dan kemarin saat acara peluncuran perizinan, tidak boleh tepuk tangan kalau ada izin yang masih hari. Hal itu perlu menjadi perhatian kita semua.

*Adakah kendala dalam menerapkan perizinan online saat ini?*

Sebenarnya bukan kendala dalam kebijakan perizinan online ini tetapi lebih tepatnya tantangan. Karena kami harus menyiapkan dan membuat beberapa hal menjadi lebih simpel. Di antaranya, kesiapan SDM baik jumlah maupun kompetensinya dalam peralihan dari pemberian pelayanan secara manual menjadi online, dukungan kehandalan IT juga sangat diperlukan untuk menjamin jalannya janji layanan, dan sosialisasi yang efektif agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik oleh pengguna jasa, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor

*Apa harapan DJBC dengan diluncurkannya program Fasilitas Perizinan Online?*

Kami berharap dengan peluncuran perizinan online diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian terutama, memperbaiki iklim investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia (peringkat EODB diharapkan juga naik), dapat meningkatkan daya tarik bagi investor sehingga akan meningkatkan nilai investasi di Indonesia. Dan untuk DJBC dapat meningkatkan citra terkait pelayanan kepabeanan dan cukai yang mudah, cepat dan modern.

## Sinergi DJBC dan DJP Untuk Optimalisasi Penerimaan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sinergi untuk mewujudkan satu kemudahan prosedural melalui integrasi sistem dan prosedur. Sebagaimana diperintahkan langsung oleh Menteri Keuangan bahwa program *joint analysis* adalah program strategis DJBC dan DJP untuk pengamanan target penerimaan negara tahun 2018, melalui program ini DJBC dan DJP diberi target sebesar 20 triliun rupiah.

Terkait itu, Kanwil DJBC Jawa Timur II dan Kanwil DJP Jawa Timur III mewujudkan program sinergi dengan melakukan penandatangan MoU Sinergi DJBC dan DJP dalam rangka optimalisasi penerimaan. Beberapa program yang telah dirancang oleh kedua instansi agar pemenuhan target bisa terpenuhi, antara lain :

1. Optimalisasi penerimaan dari PPN dan PPH melalui analisa pemesanan pita cukai (CK-1) oleh pengusaha Hasil Tembakau (HT) atau rokok, seperti diketahui *stakeholder* terbesar dan juga sebagai penyumbang penerimaan negara di wilayah DJBC Jawa Timur II adalah Industri Hasil Tembakau.
2. Pengawasan kegiatan industri HT melalui *database* PPN di DJP, melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal (rokok ilegal) salah satu misi DJBC, adanya pengawasan melalui *database* PPN dan DJP dapat mempermudah tugas DJBC dalam mengawasi peredaran rokok ilegal guna melindungi industri hasil tembakau dari pelaku usaha ilegal.
3. Implementasi *joint submission* di kawasan berikat, sinergi DJBC dan DJP diharapkan bisa menutup potensi penyalahgunaan kebijakan fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah kepada pelaku industri.

Guna mendukung program tersebut, DJBC selama Maret hingga April 2018 melaksanakan "Operasi Gempur" serentak di seluruh

wilayah Indonesia untuk memberantas peredaran rokok dan miras ilegal. Lewat operasi ini Kanwil DJBC Jatim II sendiri telah mengamankan **486.138** ribu batang rokok dan **761** liter miras dengan potensi kerugian negara sebesar **Rp 333.557.803**. Sementara itu, dalam hal kemudahan berusaha, DJBC juga melakukan simplifikasi peraturan dalam hal percepatan layanan penerbitan izin antara lain :

1. Registrasi kepabeanaan semula 1 hari kerja menjadi 3 jam
  2. Perijinan Tempat Penimbunan Berikat semula 10 hari kerja menjadi 1 jam
  3. Perijinan Pengusaha BKC semula 30 hari kerja menjadi 3 hari kerja
- Dan perijinan lainnya.

Sinergi yang sudah dibangun antara DJBC dan DJP akan diteruskan dengan sinergi antara tim perpajakan dan instansi di luar Kementerian Keuangan dan penegak hukum serta pelaku usaha dalam bingkai *collaborative compliance*. Diharapkan momen ini dapat terjalin dengan baik dan berkesinambungan sehingga target penerimaan negara yang dibebankan dapat tercapai sehingga dapat memperkuat APBN

2018 untuk Indonesia yang lebih baik. Terkait hal tersebut, WBC berkesempatan melakukan wawancara dengan Kepala Kanwil DJBC Jatim II, Agus Hermawan dan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Rudy Gunawan Bastari, di ruang kerjanya masing-masing. Menurut **Agus Hermawan**, sinergi antara Bea Cukai dan Pajak sebetulnya sudah dilakukan dari sejak percepatan reformasi. “Kami ingin program yang sudah ada tetap berjalan dan muncul terobosan-terobosan baru, seperti kemarin kita belum memperoleh data untuk distribusi bahan-bahan produksi seperti filter atau plastiknya, *nah* mudah-mudahan dari itu kita bisa dapat.”

“Saya juga ingin supaya mereka mengerti bagaimana operasi kita di pasar, bagaimana malam-malam harus cegat truk, *nah* itu dengan program *second man*. Sebenarnya hal ini secara informal sudah sering ngobrol dengan Kakanwilnya dan tidak keberatan, coba ayo kita libatkan mereka untuk ikut operasi kita. Tapi ini akan disampaikan dihadapan para Kepala kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Bea Cukai, supaya satu suara dan tidak kaget

saat kami perintahkan agar teman-teman di pajak diikutkan dalam kegiatan operasi,” ujarnya.

Termasuk jika ada kegiatan pemusnahan dan penindakan, aparat dari Pajak akan dilibatkan dalam kegiatan ini dengan tidak mengesampingkan masalah keamanannya. “Hal seperti itu coba kita lakukan supaya bisa merasakan apa yang sudah kita rasakan. Di lapangan mereka juga bisa mendapatkan data apa saja yang dibutuhkan saat kunjungan bersama Bea Cukai. Kami menganalisis data, rekan-rekan pajak memiliki *spider web*, untuk mengetahui apakah satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berkaitan atau tidak, mereka punya ilmunya kita ikutkan petugas di situ. Termasuk blokir bank, kita tidak punya kekuasaan, tetapi pajak memiliki kuasa untuk memblokir rekening di bank.”

Dengan sinergi ini diakui Agus Hermawan, kita akan lebih nyaman dalam bekerja, tidak memisah-misahkan bahwa itu adalah bagian dari tugas Pajak atau sebaliknya bahwa tugas itu milik Bea Cukai, sehingga masing-masing lepas tangan. Padahal kalau sudah mengenai masalah penerimaan negara, dan ingin menuju optimalisasi penerimaan semua unsur harus turun bersama-sama.

#### Tingkatkan Layanan, Permudah Kewajiban, Dorong Kepatuhan untuk Optimalisasi Penerimaan

Lebih lanjut menurut Kakanwil DJP Jawa Timur II, **Rudy Gunawan Bastari** yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, bahwa fokus saat ini bukan saja hubungan yang erat dan harmonis antara Bea Cukai dan Pajak tetapi bersinergi supaya penerimaan tercapai, yang berdasarkan data penerimaan tahun 2017 kemarin dinilai berhasil.

Di Kanwil Pajak Jatim III ini ungkap Rudy, lebih dari 70 persen penerimaan pajak berasal dari industri pengolahan tembakau dan turunannya. Kontribusi terbesar dari PPn-nya, sehingga menguatkan pihaknya untuk lebih erat dengan

DJBC, misalnya bersama-sama memberikan data, terkait dengan tahun 2017 mencanangkan program kerja meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) Bayar, meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang tentunya ini berhubungan dengan kepatuhan. Di 2017 kemarin juga ada indikasi peningkatan 40 persen lebih pembayaran pajak. “Untuk pertumbuhan pembayaran kita nomor 3 nasional atau sebesar 28 persen. Selama 5 tahun belum pernah seperti itu, jadi indikasinya adalah melonjaknya WP-WP yang melakukan pembayaran, terutama industri pengolahan tembakau, implisitnya berarti yang telah dilakukan bersama teman-teman BC ada hasilnya. Tadinya tidak mau bayar sekarang jadi takut kalau tidak bayar, semula bayarnya tidak sesuai, sekarang bayarnya sesuai, sebab kita berkomunikasi terus dengan Pak Agus dan teman-teman,” ungkap Rudy yang berharap agar di tahun 2018 akan lebih baik lagi hasilnya dari tahun 2017.

Dalam kegiatan sinergi ini, lanjut Rudy ada beberapa program yang tahun lalu belum dilaksanakan, sekarang akan coba untuk dilaksanakan, antara lain melakukan visit bersama ke industri rokok, tahun lalu hanya sekali, sekarang akan ditingkatkan menjadi 4 perusahaan yang dikunjungi, mulai dari yang besar, menengah dan kecil.

Kemudian program penempatan pegawai, terutama untuk mengurus kawasan berikat, termasuk bersama-sama melakukan pemusnahan pita cukai dan operasi pasar supaya juga tahu proses bisnisnya.

Sebagaimana diketahui program reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai telah menapaki tahun kedua. Berbagai capaian positif telah diraih sepanjang tahun 2017, salah satunya adalah Kanwil DJP Jawa Timur III dan Kantor Wilayah Jatim II sebesar Rp 31,53 triliun, sedangkan target penerimaan dari Bea Masuk dan Cukai yang dibebankan kepada Kanwil DJBC Jawa Timur II sebesar Rp 37,64 triliun. Beberapa program sinergi telah khusus diciptakan untuk meningkatkan pelayanan kepada para

# KONFERENSI PERS



**Sinergi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**  
Tingkatkan Layanan, Permudah Kewajiban, Dorong Kepatuhan  
untuk Optimalisasi Penerimaan

**PAJAK KITA UNTUK KITA** Kerjasama dan Sinergi dalam bingkai **COLLABORATIVE COMPLIANCE**

Malang, 10 April 2018



pengguna jasa terutama bagi mereka yang patuh terhadap aturan perpajakan. Tujuan utama sinergi dua instansi ini untuk mewujudkan satu kemudahan prosedural melalui integrasi sistem dan prosedur. Beberapa program yang telah dirancang oleh kedua instansi antara lain :

1. *Joint Analysis* yaitu melakukan pertukaran data, informasi dan analisis bersama atas Potensi Penerimaan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai serta menargetkan Wajib Pajak yang berisiko tinggi dalam rangka pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Pelaksanaan *Joint Analysis* memungkinkan untuk melakukan pertukaran data secara "real time". Rencana aksi yang akan dilakukan adalah pemberlakuan *Single Identity Number* yaitu peleburan identitas Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. *Joint Visit* yaitu melakukan kunjungan bersama ke beberapa wajib pajak yang bergerak di bidang industri pengolahan tembakau.
3. *Joint Audit* yaitu melakukan kerjasama untuk keperluan audit dan/atau pemeriksaan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai.
4. *Joint Investigation* yaitu melakukan kerja sama dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai.
5. *Joint Assistance* diimplementasikan menjadi pemberian bimbingan mengenai pemanfaatan fasilitas fiskal di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai. Kegiatan asistensi ini dilakukan oleh agen fasilitas pada DJBC dan *Account Representative* (AR) pada DJP. Pengembangan teknologi sistem informasi (IT) merupakan salah satu cara memberi kemudahan bagi pengguna layanan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagai perbaikan dicanangkan di bidang layanan perpajakan, termasuk penyederhanaan pendaftaran NPWP, kemudahan pelaporan SPT, perluasan layanan di luar kantor seperti *Mobile Tax Unit* di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Singosari, *Piloting Mall* Pelayanan Publik oleh KPP Pratama Banyuwangi dan percepatan pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF).

Sinergi yang sudah dibangun antara DJP dan DJBC akan diteruskan dengan sinergi antara tim perpajakan dan instansi di luar Kementerian Keuangan dan penegak hukum serta dengan pelaku usaha dalam bingkai *Collaborative Compliance*. Dengan kerjasama yang baik dan berkesinmbungan, diharapkan target penerimaan negara dapat tercapai sehingga dapat memperkuat APBN 2018, untuk Indonesia yang lebih baik. **(Ariessuryantini)**



## BEA CUKAI BERANTAS ROKOK ILEGAL DENGAN OPERASI GEMPUR

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar Operasi Gempur, yakni operasi penindakan serentak terhadap barang kena cukai ilegal di seluruh wilayah Indonesia, yang berlangsung sejak pertengahan Maret hingga pertengahan April 2018. Operasi yang berlangsung di wilayah produksi hingga wilayah pemesanan rokok ini, diharapkan mampu menekan peredaran rokok ilegal yang semakin luas dengan menggunakan modus-modus baru untuk melancarkan aksinya.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jawa Timur II yang memiliki luas wilayah mulai Madiun hingga Banyuwangi, merupakan wilayah merah baik untuk produksi maupun pemasaran rokok ilegal. Sebenarnya mengapa banyak pihak yang masih menginginkan adanya rokok ilegal tersebut?

Rokok sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi bangsa ini walaupun tidak semua orang Indonesia merokok, namun dari jumlah perokok yang ada mereka menempatkan rokok sebagai bagian dari kebutuhan pokoknya yang harus ada dan wajib dibeli tiap harinya layaknya sembako. Naiknya harga rokok tiap tahunnya rupanya tidak menjadikan rokok turun dari kebutuhan pokok tersebut, mulai dari beralih

ke rokok yang lebih murah hingga mencari rokok ilegal untuk memenuhi kebutuhan pokok rokok tersebut. Untuk itulah kegiatan produksi rokok ilegal masih terus dilakukan oleh beberapa masyarakat baik yang ingin mencari keuntungan besar karena memang keuntungan hasil tembakau ilegal ini sangat menggiurkan, hingga mereka yang sekedar membuat rokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jadi secara garis besar pada pelanggaran hasil tembakau ini dapat dibagi menjadi lima kategori pelanggaran. Pertama, peruntukan. Kedua, personalisasi. Ketiga, rokok polos. Keempat, rokok dengan pita cukai palsu. Dan kelima, rokok dengan pita cukai bekas. Dari kelima pelanggaran tersebut, semuanya memiliki modus yang sama dan berulang-ulang agar dapat terhindar dari petugas bea cukai.

DJBC sendiri tidak tinggal diam dengan banyaknya hasil tembakau ilegal yang mengganggu industri rokok sesungguhnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan berbagai operasi gabungan hingga operasi rutin untuk menekan angka pelanggaran rokok ilegal. Yang salah satunya dilakukan oleh Kanwil DJBC Jatim II.

Terkait pelanggaran hasil tembakau yang ada di Kanwil DJBC Jatim II, Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II, Agus Hermawan menjelaskan, sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) disebutkan wilayah Jatim II menjadi zona merah untuk produksi dan peredaran rokok ilegal yang memiliki andil terhadap naiknya nilai pelanggaran cukai tiap tahunnya.

“Dengan dilaksanakannya operasi gempur kami harapkan penindakan cukai dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan dapat memberi efek jera kepada para pelaku yang akan kami tindak. Selain itu, kami juga berharap dengan operasi gempur ini dapat menekan angka pelanggaran cukai dari 12 persen yang disampaikan UGM bisa turun ke angka 6 hingga 7 persen sesuai arahan Dirjen. Namun yang lebih penting lagi, operasi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan misi kita, yaitu melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal,” ungkap Agus.

Sebenarnya seberapa parah pelanggaran hasil tembakau yang ada di Kanwil DJBC Jatim II ini? Menurut Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jatim II, Rizal, khusus Jatim II yang menjadi wilayah produksi dan pemasaran rokok ilegal hampir menyebar di beberapa daerah, dengan adanya Operasi Gempur ini tegahan yang didapatkan pun hampir ada di semua wilayah, dan ini dapat dibuktikan dengan banyaknya surat bukti penindakan yang telah dikeluarkan sejak awal Operasi Gempur hingga 14 April 2018.

Tidak hanya Jatim II, Rizal juga mengatakan kalau untuk Kanwil Jateng, Jatim I dan Jatim II, merupakan wilayah produksi sehingga disini juga banyak diproduksi rokok ilegal, untuk itu semua pihak juga tetap melakukan koordinasi dengan wilayah pemasaran seperti daerah Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi untuk memantau pergerakan rokok ilegal hingga upaya pertukaran informasi terus dilakukan untuk saling mendukung operasi tersebut.

Sedangkan untuk tim yang ada di tiap-tiap kanwil yang terdiri dari beberapa petugas di KPPBC dan Kanwil memiliki wilayah pengawasan dan penindakan yang tidak hanya sebatas wilayah KPPBC-nya saja, tim pada Operasi Gempur ini juga memiliki wilayah pengawasan dan penindakan yang ada di bawah kantor wilayah. Dengan dukungan dan gabungan tim ini diharapkan masing-masing kantor pelayanan dapat dukungan penuh dalam melakukan operasi maupun penindakan.

“Dari Surat Bukti Penindakan (SBP) yang telah dikeluarkan, sebanyak 70 SBP tersebar mulai dari kanwil hingga semua kantor pelayanan. Yaitu, Kanwil 4 SBP, KPPBC Malang 5 SBP, KPPBC Kediri 13 SBP, KPPBC Blitar 15 SBP, KPPBC Madiun 11 SBP, KPPBC Probolinggo 7 SBP, KPPBC Jember 9 SBP dan KPPBC Banyuwangi 6 SBP,” terang Rizal.

Untuk jumlah tegahan hasil tembakau, Rizal menambahkan dari seluruh kegiatan penindakan di wilayah Kanwil Jatim II, berhasil ditegah 486.138 batang, sedangkan untuk MMEA berhasil diregah 761 liter. Adapun untuk total perkiraan nilai barang mencapai Rp 333.557.803, sedangkan untuk total potensi kurang bayar mencapai Rp 228.231.412.



**Arief Hartono**  
Kepala seksi Intelijen dan Penindakan  
KPPBC TMC Malang

Hasil penindakan yang dilakukan saat Operasi Gempur memang sudah berkurang jauh karena sebelumnya di wilayah Jatim II, juga telah dilakukan operasi rutin untuk pemberantasan cukai ilegal. Hal ini juga diakui oleh Kepala seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Malang, Arief Hartono. Menurutnya jauh sebelum ada Operasi Gempur, Bea Cukai Malang sudah melakukan operasi rutin untuk pemberantasan rokok ilegal.

“Kami sejak awal tahun 2018 mulai Januari sudah kencang melakukan operasi dan dari kegiatan itu hampir tiap hari kami berhasil menegah. Namun demikian, satu modus yang kini berhasil diungkap oleh kami adalah adanya peredaran bahan baku tembakau yang merupakan barang sisa dari pabrik rokok besar yang seharusnya dimusnahkan,” ujar Arief.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rizal, untuk saat ini bahan baku pembuatan rokok ilegal sudah sangat sulit didapat karena pihaknya rutin melakukan operasi, bahkan kalau dulu untuk bahan baku bisa dibawa dengan truk terbuka kini sudah dengan mobil *box* karena modus yang dilakukan sudah terdeteksi semua. Namun demikian, bukan berarti operasi ini dapat berjalan mulus begitu saja. Adanya

perlawanan dari masyarakat sekitar yang juga menggantungkan hidupnya dari pembuatan rokok ilegal, menjadi kendala tersendiri yang tiap saat harus dihadapi, namun sejauh ini dapat diatasi dengan bekerjasama bersama instansi keamanan lainnya.

Pemutusan rantai bahan baku rokok ilegal yang ada di wilayah Jatim II memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peredaran rokok ilegal. Para pembuat rokok ilegal seakan menjerit saat ini setelah modus mendapatkan bahan baku mereka terputus. “Belum lama ini kami menegah sebanyak 60 ton bahan baku rokok ilegal yang diambil dari sisa produksi pabrik besar yang seharusnya dimusnahkan dan oknum tertentu melencengkan sebagian untuk dijual. Dari jumlah 60 ton saja secara kasar kami bisa mencegah pembuatan 6 juta batang rokok ilegal, satu jumlah yang cukup besar dengan nilai yang juga besar,” jelas Agus.

Keberhasilan dari Operasi Gempur tentunya juga tidak lepas dari peran asosiasi, pengusaha dan masyarakat yang selalu memberikan informasi akan adanya kegiatan rokok ilegal. Karena banyak kegiatan rokok ilegal bahkan pembuatan pita cukai palsu yang dibuat di wilayah tertentu yang sebelumnya tidak disangka dan diduga. Dengan informasi dan

kerja sama masyarakat inilah kegiatan operasi cukai ilegal selama ini dapat berhasil dengan baik.

“Beberapa modus yang selama ini tidak terpantau oleh kami adalah kerja sama pembuat rokok ilegal dengan perusahaan jasa titipan. Memang untuk perusahaan jasa titipan mereka tidak salah karena menerima titipan barang yang sesuai, namun tidak paham kalau barang tersebut berpotensi merugikan negara. Untuk itu, sekarang kami sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan jasa titipan untuk segera memberikan informasi kepada kami jika mendapat kiriman barang hasil tembakau,” terang Agus.

Operasi Gempur yang dilakukan Kanwil DJBC Jatim II berjalan dengan sukses, namun demikian keberhasilan ini tidak berhenti saat gelaran Operasi Gempur sudah selesai. Dengan semangat yang tidak turun dan koordinasi yang semakin solid membuat produksi rokok ilegal semakin sulit walaupun untuk membuat hilang tidak akan mungkin selama permintaan tetap banyak.

Tanpa adanya operasi gabungan, DJBC tetap melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hasil tembakau. Semakin sempit ruang gerak rokok ilegal semakin menurun tingkat pelanggaran cukai hasil tembakau, yang artinya para pengusaha rokok legal dapat bersaing dengan baik tanpa khawatir adanya gangguan rokok ilegal di wilayah pemasarannya. (Supriyadi)





## TEDDY TRIATMODJO DAN KETERTARIKANNYA DENGAN DUNIA KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN

Teddy Triatmojo, kelahiran Malang 17 April 1983, mengaku sangat tertarik dengan dunia kehumasan, terutama di tempatnya bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengalaman-pengalaman yang dialaminya telah memotivasinya untuk makin tertarik dengan masalah kehumasan. Saat awal bekerja di Bea Cukai ia mengaku bangga dengan posisinya yang bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan, namun pada saat memperkenalkan diri ke orang-orang di luar Bea Cukai maka yang timbul selalu saja reaksi-reaksi yang terkadang membuatnya tersinggung, sedih, kadang marah dan frustrasi, tak tahu harus berbuat apa.

“Ketika saya memperkenalkan diri ke orang-orang baru, halo saya Teddy bekerja di Bea cukai, pasti reaksinya wah enak dong banyak barang-barang *black market*, inilah itulah. Hal-hal ini menyadarkan saya, ternyata masyarakat umum atau juga orang-orang di sekitar saya ketika mereka mendengar kata Bea Cukai, maka yang terasosiasikan di benak mereka adalah hal-hal yang *stereotypical*, bukan



hal-hal yang sebenarnya. Dari situlah saya termotivasi berangkat menempuh pendidikan S2 di bidang komunikasi. Konsep pemikiran ini juga yang saya ‘jual’ pada saat saya di-*interview* untuk mendapatkan beasiswa,” ujar Teddy.

“Saat ditanya alasan saya tertarik mengambil kehumasan, tentunya berangkat dari keinginan saya merubah itu semua. Inginnya, saat saya memperkenalkan diri, saya bisa bangga menyebutkan diri saya sebagai pegawai bea cukai dan saya ingin orang-orang memiliki *respect* dan *attitude* yang sama, sebagaimana saya memandang organisasi saya,” ujarnya lagi.

Ada juga cerita tentang pengalaman pendidikan yang bisa jadi sangat berpengaruh terhadap arah karirnya sampai hari ini. Teddy ingat betul ketika ada kesempatan di tahun 2012 Kementerian Luar Negeri membuka kesempatan kepada seluruh PNS untuk mengikuti pendidikan penulisan pidato kepresidenan berbahasa Inggris, yakni *Presidential Speech Writing Program* atau Program Pendidikan dan Latihan Penulisan Pidato untuk Presiden. Program tersebut dilaksanakan di Washington DC, Amerika Serikat selama satu semester, dan bertujuan untuk mengumpulkan penulis-penulis muda untuk pidato presiden.

“Waktu itu saya coba ikut, ternyata lolos, proses seleksinya cukup berliku dan panjang, mulai dari pemberkasan, tes bahasa Inggris, tes penulisan pidato, dan wawancara. Tim panelnya lumayan banyak, satu orang duta besar, dua orang *native speakers*, dan satu orang lagi pejabat Kemenlu dari Pusat Pendidikan dan Latihan Kemenlu. Pada akhirnya, saya punya kesempatan berangkat untuk mengikuti pendidikan tersebut,” demikian ceritanya.

Selama satu semester mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut, Teddy jadi semakin berpikiran terbuka dan mengerti pentingnya komunikasi dan cara menulis yang baik, terutama penulisan pidato. Teddy mendalami teknik-teknik komunikasi terutama dalam bahasa tulisan. “Saya belajar bagaimana menulis dengan baik, menulis pidato dengan baik, dan bagaimana komunikasi yang baik itu dilakukan. Dari situ saya mengalami pencerahan, ternyata ada banyak ilmu yang bisa dipelajari di luar sana terlepas dari kemampuan teknis dan pengetahuan teknis yang kita dapat saat bekerja di Bea Cukai.”

Karenanya, timbul keinginan di dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang lain yang harus Teddy dalam dan kembangkan. Mungkin sudah



waktunya ia melihat kebutuhan organisasi di sisi lain selain kebutuhan utamanya, yaitu jika di Bea Cukai adalah pegawai atau pejabat yang memiliki kemampuan teknis terutama di bidang kepabeanan dan cukai, ia melihat harus ada orang-orang yang memang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkontribusi bagi organisasi di sektor-sektor yang lain yang juga penting untuk pengembangan organisasi, sisi inilah yang disebut komunikasi atau akrab dikenal dengan komunikasi massa.

Teddy juga banyak belajar bagaimana caranya sebuah kata dapat menginspirasi orang-orang. Ia pun tertarik mempelajari lebih lanjut tentang komunikasi, apalagi ketika itu ia melihat kehumasan di Bea Cukai telah ada di tingkat Kepala Seksi atau eselon IV. Ia beripikir, kehumasan di Bea Cukai sudah ada wadahnya, tidak ada salahnya mendalami masalah komunikasi, dan ini juga jadi kepentingan yang signifikan bagi pegawai-pegawai Bea Cukai untuk mengambil pendidikan dan memiliki kemampuan di bidang kehumasan.

Ia juga memiliki pemikiran kalau dirinya juga mengambil jurusan ekonomi atau hukum seperti rekan-rekannya yang lain, lalu siapakah

nanti yang akan memegang atau membawa fungsi kehumasan di Bea Cukai kalau tidak mempelajari ilmunya secara khusus, tetapi bukan berarti kalau jurusan yang lain sudah terlalu banyak, tetapi karena memang kenyataannya kebutuhannya sangat besar. Ia hanya berpedoman kalau waktu itu dirinya istilahnya 'mengorbankan' diri dengan beberapa temannya dan beberapa pejabat lainnya yang sudah mengambil S2 Komunikasi supaya ilmu yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk membangun bidang kehumasan.

"Kita perlu sekali orang-orang yang memiliki spesifikasi atau kemampuan teknis di bidang-bidang yang memang tersedia di kantor, dari situ akhirnya saya berangkat ke Australia untuk menempuh pendidikan di bidang kehumasan, padahal waktu itu belum ada hubungannya dengan bidang pekerjaan saya, posisi saya waktu itu masih di Direktorat Kepabeanan Internasional. Ke Australia berangkat dari ketertarikan saya di tahun 2012 yang mengikuti diklat penulisan pidato di Amerika, akhirnya di tahun 2015 saya daftar S2 memantapkan diri memilih Kehumasan," ujar Teddy yang meraih gelar *Master of Strategic Public* tahun 2017 dari *University of Sidney*.

Menurut Teddy, humas saat ini sudah berada di jalur yang benar dan tepat. Jika diperhatikan dari perkembangannya dulunya berada di eselon IV, kemudian sekarang berada di eselon III dan sudah ada pembahasan untuk menambahkan kewenangan dan kepercayaan pada tingkat eselon yang lebih tinggi. "Saya berharap dengan semakin tingginya apresiasi instansi terhadap fungsi kehumasan, maka kehumasan bisa lebih efektif menjalankan perannya, terutama dalam hal membimbing sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat maupun pengguna jasa secara langsung,"

Menurutnya instansi Bea Cukai mau tidak mau, suka tidak suka secara tidak langsung hampir seluruh masyarakat Indonesia berhubungan dengan fungsi Bea Cukai, mulai dari baju yang kita pakai kainnya impor dari negara tertentu, sabun yang kita pakai dan lainnya, hampir semua lini kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia akan bersinggungan dengan bea cukai, tetapi belum semua masyarakat memahami dan mengerti tugas Bea Cukai secara gamblang. "Menurut saya tugas kita, juga tugas masyarakat untuk sama-sama menjalin hubungan lebih baik di mana fungsi humas Bea Cukai akhirnya menjembatani tujuan tersebut," ujar Teddy yang menempuh pendidikan Program DIII kepabeanan dan cukai tahun 2000-2003 dan Diploma IV akuntansi khusus tahun 2009-2012.

### Generasi Milenial BC Harus Kreatif Dan Tidak Salah Arah

Sebagaimana diketahui bahwa 60 persen pegawai DJBC saat ini adalah generasi milenial. Pandangan dan penilaiannya tentang generasi ini terbentuk dalam pandangan kerja teman-temannya yang kebetulan masuk ke generasi milenial. Paling tidak ia menilai adanya perbedaan pola arah pandang dan arahan hidup yang semuanya dipengaruhi oleh paparan terhadap informasi. Teman-temannya yang terlahir sebagai generasi milenial mendapatkan informasi dengan sangat mudah, berbeda dengan para senior sebelumnya. "Dari situ kita

bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka sangat *knowledgeable*, punya berbagai macam pengetahuan yang akhirnya menjadikan mereka sebagai makhluk kreatif, karena sumber dasar kreatifitas maupun ide adalah pengetahuan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan maka kita tidak punya pijakan untuk menjadi lebih kreatif ataupun juga punya ide-ide yang bisa diwujudkan menjadi *output* ataupun *outcome* untuk sebuah organisasi," demikian ungkap Teddy yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi PLI di KPPBC Ngurah Rai, Bali.

Sarannya untuk para generasi milenial agar kreatifitasnya tidak salah arah terutama dalam penggunaan media sosial, agar lebih waspada, disaring terlebih dulu apakah informasinya memang sudah benar terutama yang menyangkut organisasi. Jadi walaupun teman-teman pegawai itu bukan orang di bidang humas, tetapi tetap harus memiliki tanggung jawab humas, baik moral maupun *legal*-nya ketika mengeluarkan informasi pada saat menggunakan media sosial.

Ketika ditanyakan apa motto hidup yang dipegangnya dalam menjalani hidup, Teddy mengungkapkan ada satu yang selalu ia pegang teguh yang berasal dari petuah orang tuanya. "Ketika kita menginginkan sesuatu atau ketika kita memiliki mimpi janganlah usaha untuk meraih mimpi tersebut berhenti di tangan saya sendiri, usahakan sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan sesuai porsi kita. Dari situ saya bisa belajar banyak hal, yang pertama, jangan kita mudah menyerah, kedua kita sudah sekuat tenaga mengerjakan apapun dalam usaha meraih mimpi pada akhirnya akan ada kejadian diluar kuasa kita yang akan menentukan apakah mimpi kita akan tercapai atau tidak. Jadi di satu sisi akan menguatkan saya untuk selalu berusaha, dan di sisi lain selalu membuat saya untuk rendah hati, dan sadar bahwa tidak semua keputusan atau tidak semua kekuasaan ada di tangan saya," pungkas Teddy mengakhiri cerita. **Ariessuryantini.**

## INGGRIS PERANGI CANDU FROZEN SPICE

Inggris dihadapkan oleh masalah sosial, di mana kecanduan menimpa tunawisma, terutama di kawasan Manchester, sebuah kota besar di Heartlands Utara, Inggris. Para pekerja sosial di Inggris bagian utara mengatakan mereka khawatir dengan banyaknya tunawisma yang kecanduan dengan obat sintetis “*spice*” atau dikenal dengan “*frozen spice*”.

*Spice* adalah ganja kimia buatan yang termasuk dalam zat psikoaktif baru. *Spice* berasal dari campuran berbagai bahan kimia, di mana sebagian di antaranya mengandung bahan kimia ilegal yang menghasilkan efek mirip obat-obatan terlarang seperti kokain, ganja, dan ekstasi.

Sejak Mei 2006, pemerintah Inggris menyatakan obat-obatan seperti *spice* adalah ilegal, tetapi bukan berarti peredarannya mudah dihentikan. Bahkan di Manchester sekalipun, meski pengawasan dan penegakan hukum ditingkatkan, namun jumlah pecandunya terus bertambah. Pengguna *spice* mengatakan gejala berhenti dari candu sangat sulit diatasi, belum ditambah dengan harga yang murah.

Lembaga amal Lifeshare memperkirakan 95 persen dari orang-orang tunawisma yang dibantu adalah pengguna *spice*, hal ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya orang menggunakan obat-obatan dan varian yang lebih kuat seperti *frozen spice*. Bagi Julie Boyle, relawan pendamping tunawisma dari Amalshare, suasana di jalan-jalan begitu menyedihkan karena banyak orang yang kecanduan *spice*. Anda dapat mudah melihat mereka, karena setelah mereka merokok *spice* mereka tampak seperti *zombie* di pingiran jalan.

Greater Manchester Police mengaku telah bekerja keras untuk mencegah transaksi *spice* terus terjadi di pusat kota. Mereka juga fokus pada upaya membangun kecerdasan dan melaksanakan pekerjaan penegakan hukum. Di tengah semakin banyaknya orang mengkonsumsi *spice* di tempat umum, kepolisian ingin memastikan agar daerah tersebut menjadi tempat yang aman bagi seluruh masyarakat.

Otoritas lokal di Manchester juga melaporkan masalah penggunaan *spice* telah berkembang menjadi *new psikoaktif substances* atau jenis psikotropika baru, sehingga penanganannya tidak terbatas pada kota mereka dan ini menjadi masalah sosial di Inggris, khususnya di antara kelompok-kelompok rentan dan masyarakat tunawisma.

Para ilmuwan lokal sudah berusaha untuk menemukan lebih banyak tentang komposisi obat, karena efek *spice* telah menyebabkan efek samping yang sangat spesifik. Layanan ambulans lokal mengatakan meningkatnya jumlah insiden memaksa sumber daya mereka untuk bekerja lebih keras di jalanan Inggris karena mereka juga memerangi narkoba yang semakin inovatif membuat jenis obat-obatan terlarang baru. **(Ariessuryantini-Berbagai Sumber)**



# KERUSAKAN GIGI ANAK

## YANG DISEBABKAN OLEH KEBIASAAN BURUK

Menjaga dan memelihara kesehatan gigi dan mulut adalah suatu keharusan. Menyikat gigi setiap hari minimal dua kali sehari dan dengan cara menyikat yang benar. Sejak kecil anak harus diajarkan cara menyikat gigi yang benar, dengan cara menyikat seluruh permukaan gigi. Menyikat gigi gunanya untuk menghilangkan atau membersihkan sisa makanan yang menempel di gigi dan jaringan mulut lainnya. Sebagian besar orang Indonesia hanya menyikat gigi saat mandi pagi dan mandi sore, waktu yang paling tepat untuk menyikat gigi adalah setiap selesai makan dan sebelum tidur. Hal ini dapat mengurangi risiko gigi berlubang sebanyak 50 persen. Selain itu juga harus menyikat gigi dengan cara yang tepat, yaitu dari arah gusi ke gigi, sehingga tidak mengikis gusi. Ketika menyikat gigi atas, lakukan dari atas ke bawah. Sedangkan ketika menyikat gigi bawah, lakukan dari arah bawah ke atas. Kemudian untuk gigi geraham harus disikat pada permukaannya. Kesehatan gigi dan mulut tentu penting bagi setiap orang. Selain berdampak pada estetika, kesehatan gigi juga bisa berakibat pada tumbuh kembang seseorang, terlebih anak-anak.

Selain membersihkan gigi dengan baik dan benar hal lain yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut adalah pola makan. Pada anak-anak yang belum bisa memilih makanan yang baik atau tidak, dapat membuat mereka mampu memakan apapun yang mereka sukai. Jika dibiarkan terus-menerus, mengonsumsi sembarang makanan dapat menjadi kebiasaan buruk pada anak yang merusak gigi. Mengonsumsi makanan dan minuman manis membuat derajat keasaman yang ada pada rongga mulut meningkat, sehingga memicu terbentuknya plak pada gigi dan produksi asam oleh bakteri juga semakin sering. Selain itu, email gigi juga menjadi rentan terhadap gigi berlubang. Sebaiknya jangan terlalu sering memberikan anak makanan dan minuman yang berkadar gula tinggi. Cobalah untuk memberi makanan dan minuman lain seperti sayuran dan buah-buahan yang dijus yang memiliki gizi dan vitamin yang juga bermanfaat bagi tubuh kembang anak.

Yang tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah kebiasaan seseorang. Kebiasaan sehari-hari banyak berpengaruh pada kesehatan gigi dan mulut, terutama kebiasaan buruk yang berhubungan dengan gigi. Kebiasaan buruk adalah perilaku/tindakan yang sering dilakukan sehari-hari, baik disengaja atau tidak disengaja sehingga menghasilkan akibat yang tidak baik bagi. Kebiasaan buruk dalam hal ini yaitu kebiasaan buruk yang berdampak tidak baik terhadap kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut. Sebagian besar orang cenderung berpikir bahwa hanya kebiasaan seperti merokok dan minum kopi bisa merusak gigi. Padahal ada banyak kebiasaan sehari-hari lainnya yang secara langsung atau tidak langsung bisa menyebabkan kerusakan pada gigi. Kita juga harus menghindari aneka kebiasaan buruk yang bisa merusak gigi. Mari kita bahas kebiasaan buruk apa saja yang dapat menjadi penyebab kerusakan pada gigi anak.

### Kebiasaan-kebiasaan buruk pada anak :

#### Menghisap ibu jari

Mengisap ibu jari dapat membuat anak merasa nyaman dan tidak rewel. Namun ternyata kebiasaan seperti ini dapat memengaruhi kontur rahang atau terjadinya maloklusi membuat gigi lebih maju (tonggos). Tentu saja ini akan berpengaruh secara estetis dan pada proses mengunyah makanan. Penting bagi orang tua untuk segera melarang anak memasukkan ibu jari atau jari lain pada mulut.

Cara pencegahannya, sejak awal tidak membiarkan si kecil memasukkan ibu jari ke dalam mulut.

#### Menyimpan Makanan Terlalu Lama di Rongga Mulut

Saat mulut tertutup, produksi kelenjar ludah berkurang. Saat itulah, karbohidrat dari sisa makanan di dalam mulut difermentasikan oleh bakteri menjadi asam. Rasa asam inilah yang memicu terjadinya gigi berlubang.

Cara pencegahannya, latih anak mengonsumsi makanan padat sesuai tahap perkembangan usia. Latihan ini juga berfungsi memperkenalkan si kecil pada berbagai tekstur makanan sekaligus merangsang proses pertumbuhan, perkembangan rahang maupun gigi.

#### Minum susu dari botol dot

Khususnya minum susu menggunakan dot dalam posisi tiduran. Ketika anak minum susu melalui botol dot, mulut akan tertutup, begitu pula dengan lidah, sehingga gigi atas dan geraham belakang akan terendam oleh susu. Tidak hanya itu, aliran saliva pada mulut pun akan berkurang sehingga tidak ada cairan pembersih mulut. Proses seperti ini apabila

dibiarkan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama, akan membentuk karies secara bertahap.

Cara pencegahan, bilas mulutnya dengan air putih agar tak ada sisa susu menempel di gigi. Jika si kecil berusia 2 tahun, gantilah botol susu dengan gelas. Minum menggunakan sendok atau sedotan.

#### Menggigit Kuku, Pensil, atau Benda Keras Lain

Kebiasaan menggigit benda keras juga bisa membuat gigi mengalami fraktur atau keretakan. Biasanya anak yang gemar menggigit-gigit benda akan mengalami *crossbite*, yaitu posisi gigi bawah yang lebih maju ketimbang gigi atas. Cara pencegahannya, orang tua bisa terus mengingatkan anak agar tidak memasukkan benda asing selain makanan dan minuman ke dalam mulut.

#### Malas membawa anak ke dokter gigi

Sejak anak masih berusia dini, orang tua seharusnya sudah membiasakan untuk berkunjung ke dokter gigi agar anak terbiasa hingga dewasa. Pada anak-anak disarankan untuk ke dokter gigi setiap tiga sampai empat bulan sekali. Karena anak yang masih berada dalam tahap tumbuh kembang, sehingga dokter dapat melakukan tindakan preventif pada anak jika teridentifikasi masalah gigi.

Drg. Etty M. Hustiwati  
Poliklinik Kantor Pusat KPDJBC





Seorang fotografer kelahiran San Fransisco yang juga banyak menggunakan lensa 50mm untuk memotret pemandangan. Dengan kalimat populernya "you don't just take photos, you 'make' photos".

Dengan kata lain, lensa dengan panjang fokal tertentu tidak membatasi kita untuk memotret apa saja! Punya lensa yang tidak berfitur zoom? Zoom with your feet!

Ansel Adams (1902-1984)





**Harry Lang**  
KPPBC TMP C Sintete

***Di Perbatasan***

Karya : Budhi Setyawan

ini Nunukan,  
sekepal tanah yang dilemparkan raja  
dari jantung Borneo  
sebagai pelampung, sebagai penampung  
kenangan yang teraut  
derap derap pacuan zaman

orang orang berlari di medan tarung  
raung lapar dan haus  
terukir di pintu dermaga  
kaki kaki terbakar gelisah

o, pulau pulau hanyalah buih yang  
mengapung  
dari pasi janji janji kota Jawa  
terus melata dalam kelim

Nunukan, segempil perasaan  
yang terlepas dari induk debaran

**Nunukan, 7 November 2012**



**2  
MEI**

**SELAMAT HARI  
PENDIDIKAN  
NASIONAL**



## **“Untuk Mampu Bersaing Dengan Negara Lain, Indonesia Memerlukan Kemudahan Perizinan Berusaha”**

---

Robi Toni (Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC)

